

SKRIPSI

EVEKTIFITAS KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMP NEGERI 7 BREBES

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

RASTO RAHARJO

NPM.2115500064

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2020



PERSETUJUAN

SKRIPSI

**EVEKTIFITAS KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DI SMP NEGERI 7 BREBES**

SKRIPSI

Diajukan dalam rangka penyelesaian studi Strata S1 untuk mencapai
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

RASTO RAHARJO

NPM : 2115500064

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Dra. Sri Sutjiatmi, M.Si
NIP. 196305271988032001

Pembimbing II

Agus Setio Widodo. S.IP. M.Si
NIPY 16952681974



PANITIA UJIAN SKRIPSI SEMESTER GASAL T.A 2019/2020
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera Km.1 TegalTelp (0283) 323290

PENGESAHAN

EVEKTIFITAS KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMP NEGERI 7 BREBES

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Pada hari : Senin

Tanggal : 27 Januari 2020

Dewan Penguji :

Ketua Dewan Penguji : Unggul Sugi Harto, S.IP, M.Si
NIPY 14251921973

Sekretaris Dewan Penguji : Agus Setio Widodo. S.IP. M.Si
NIPY.16652681974

Anggota Dewan Penguji : Dra. Sri Sutjiatmi, M.Si
NIP. 196305271988032001

()
()
()



Dekan,
Dr. Nuridin, SH.,MH
NIPY 9351091960

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rasto Raharjo
NPM : 2115500064
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Epektifitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 7 Brebes

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar dibuat dan disusun sendiri bukan buatan hasil karya orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademis.

Tegal, 2 Pebruari 2020



Rasto Raharjo
NPM 2115500064

MOTTO :

“ selalu ada jalan bagi orang yang bersungguh-sungguh “

“ Berusaha , berdo'a dan tawaqal kepada Tuhan yang Maha Kuasa “

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Untuk Bapak dan Ibu tercinta yang selama ini selalu mendukung, mendoakan serta menemani setiap langkah proses perjalanan kuliah sampai akhirnya bisa menyelesaikan karya skripsi ini sehingga mendapat predikat lulus. Terimakasih untuk semuanya.
2. Untuk Istrikuku tercinta yang selama ini sudah mendampingiku berbagi suka maupun duka, memberi support dan mendoakan selalu dari awal menjalani kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Untuk anak-anak ku tersayang, semoga sehat selalu.
4. Terimakasih untuk keluarga besar yang telah memberikan Do'a dan support serta limpahan kasih sayang yang tulus
5. Teman-teman semua dan sahabat perjuangaku ,kalian luar biasa
6. Keluarga Besar FISIP UPS Tegal , Dekanat, Dosen serta staf kependidikan selalu memberikan motivasi .
7. AlmamaterkuTercinta terimakasih.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat tersusun dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Bapak Dr. Nuridin, SH, MH selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Unggul Sugi Harto, S.IP, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan hingga selesainya skripsi ini.
5. Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Brebes yang telah memberikan support kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Guru dan Staf Kependidikan SMP Negeri 7 Brebes yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
8. Rekan-rekan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak atas segala bantuan dan jasa yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga tulisan sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang budiman.

Tegal, Pebruari 2020

Penulis,

ABSTRAK

Rasto Raharjo, NPM : 2115500065, Judul : Eektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 7 Brebes

Pokok-pokok permasalahan ini adalah : (1) Bagaimana Eektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP N 7 Brebes? (2) Bagaimana kendala – kendala dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP N 7 Brebes ?(3) Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala – kendala dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah SMP N 7 Brebes sehingga bisa berjalan secara efektif

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah :

1. Mendeskripsikan Eektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP N 7 Brebes
2. Mendeskripsikan kendala – kendala dalam kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP N 7 Brebes
3. Mendeskripsikan solusi pada kendala-kendala dalam penerapan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di SMP N 7 Brebes.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif dengan metode kualitatif dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis Eektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP N 7 Brebes

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk dapat kesimpulan. Penelitian ini tidak mengkaji hipotesis atau membuat prediksi, melainkan hanya menjelaskan situasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sekolah SMP Negeri 7 sudah menggunakan dana BOS namun penggunaan BOS di SMP Negeri 7 Brebes belum efektif, masih melakukan penarikan iuran berupa SPP setiap bulannya kepada orang tua/ wali siswa melalui komite sekolah, walaupun dengan menamakan sumbangan sukarela. Kendala – kendalanya adalah masih kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang diberikan tim manajemen BOS Kabupaten kepada tim manajemen BOS Sekolah , pengawasan oleh Dinas Pendidikan kepada sekolah yang dilakukan dalam hal penggunaan dana BOS belum maksimal, Minimnya dana BOS yang diperoleh oleh sekolah. Solusi yang dilakukan adalah peningkatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh tim manajemen BOS Kota/Kabupaten, pengawasan yang komprehensif dari pihak yang berwenang dan perlunya penambahan jumlah besaran dana BOS untuk mencukupi biaya operasional sekolah

Kata kunci : Eektivitas, Bantuan Operasional Sekolah, Kebijakan

ABSTRACT

Rasto Raharjo, NPM: 2115500065, Title: The Effectiveness of the School Operational Assistance (BOS) Policy in SMP Negeri 7 Brebes

The main issues are: (1) How is the Effectiveness of the School Operational Assistance (BOS) Policy at SMP N 7 Brebes? (2) What are the obstacles in the implementation of School Operational Assistance (BOS) in SMP N 7 Brebes? (3) What is the solution to overcome the constraints in implementing School Operational Assistance in SMP N 7 Brebes so that it can run effectively

The objectives to be achieved in the study are:

- 1. Describe the Effectiveness of the School Operational Assistance (BOS) Policy in SMP N 7 Brebes*
- 2. Describe the constraints in the School Operational Assistance (BOS) policy at SMP N 7 Brebes*
- 3. Describe the solution to the constraints in implementing the School Operational Assistance policy at SMP N 7 Brebes.*

This type of research is a descriptive type with a qualitative method with the aim of describing and analyzing the effectiveness of the School Operational Assistance Policy (BOS) at SMP N 7 Brebes

Analysis of the data used is qualitative data analysis that is described by words or sentences which are separated according to categories for conclusions. This study does not study hypotheses or make predictions, but only explains the situation. The results of this study indicate that the SMP Negeri 7 School has used BOS funds but the use of BOS in SMP Negeri 7 Brebes has not been effective, still making tuition fees in the form of monthly fees to parents / guardians of students through school committees, even though by naming voluntary contributions. The constraints are

the lack of socialization and assistance provided by the District BOS management team to the School BOS management team, supervision by the Education Office to schools conducted in terms of the use of BOS funds has not been maximized, The lack of BOS funds obtained by schools. The solution is to increase the socialization and assistance carried out by the City / Regency BOS management team, comprehensive supervision from the authorities and the need to increase the amount of BOS funds to meet school operational costs.

Keywords: *Effectiveness, School Operational Assistance, Policy*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	8
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
II.1 Kerangka Teori	12
II.2 Definisi Konsep	35
II.3 Pokok-pokok Penelitian	35
II.4 Alur Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	

III.1 Tipe Penelitian	39
III.2 Jenis dan Sumber Data	40
III.3 Informan Penelitian	40
III.4 Teknik Pengumpulan Data	41
III.5 Teknik dan Analisis Data	43
BAB IV DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN	
IV.1 Profil Sekolah SMP Negeri 7 Brebes	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
V.1. Hasil Penelitian	65
V.2. Pembahasan	97
BAB VI PENUTUP	
VI.1 Kesimpulan	112
VI.2 Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Siswa dalam empat Tahun Terakhir	5
Tabel IV.1 Jumlah Pendaftar Siswa Baru dalam 3 tahun terakhir	50
Tabel IV.2. Jumlah Siswa dalam empat Tahun Terakhir	51
Tabel IV.3. Jumlah Kelulusan dalam empat tahun terakhir.....	51
Tabel IV.4. Jumlah siswa melanjutkan dalam empat tahun terakhir	52
Tabel IV.5. Data Kenaikan Kelas	52
Tabel IV.6. Jumlah siswa drop out	53
Tabel IV.7. Prestasi Akademik	53
Tabel IV.8. Prestasi Akademik Rerata NUAN	54
Tabel IV.9. Prestasi Akademik Nilai Ujian Sekolah	54
Tabel IV.10. Jumlah Pendidik tenaga kependidikan	56
Tabel IV.11. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah	57
Tabel IV.12. Kualifikasi pendidikan	58
Tabel IV.13. Jumlah guru berdasarkan pangkat/golongan	58
Tabel IV.14. Jumlah Guru Brsertifikat pendidikan	59
Tabel IV.15. Guru dengan tugas mengajar	59
Tabel IV.16. Pengembangan Kompetensi Profesionalisme	60
Tabel IV.17. Jumlah tenaga kependidikan	61
Tabel IV.18 Perolehan NUM	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Foto kartu SPP SMP N 7 Brebes	8
Gambar II.1 Alur Pikir	38
Gambar IV.1. Struktur Organisasi	64
Gambar 4. 2. Struktur Organisasi DPUPR Kabupaten Pemalang	61

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan upaya pemerintah membentuk satu sistem pendidikan nasional yang bernafaskan nilai-nilai Undang-undang telah di manifestasikan ke dalam implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalamnya, ada kewajiban untuk menyelenggarakan suasana belajar dan proses pembelajaran dimana peserta didik terlibat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka Pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi

pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal nasional dan global.

Pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa serta menyiapkan manusia sebagai warga negara yang baik. Melalui proses pendidikan akan menjadikan seseorang semakin memiliki makna, baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat yang akan mengantarkannya menjadi sumber daya manusia yang kompetitif. Mengingat manfaat pendidikan yang sangat luas dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di segala bidang, maka pendidikan telah menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat sejak Indonesia merdeka. Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk meningkatkan layanan pendidikan agar semakin berkualitas dari waktu ke waktu dan pendidikan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut telah dan terus dilakukan, mulai dari berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, sampai dengan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun, indikator ke arah mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan masih banyak siswa yang putus sekolah karena faktor kemiskinan.

Salah satu aspek penting dalam pembangunan pendidikan adalah pembiayaan. Masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan operasional sekolah, dan bagaimana melindungi masyarakat, khususnya dari keluarga tidak mampu dari hambatan biaya untuk memperoleh pendidikan. Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu

proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar (Matin, 2014: 4). Hal-hal yang berkaitan dengan ini meliputi: perencanaan anggaran sekolah, pembiayaan pendidikan, pelaksanaan anggaran pendidikan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan pendidikan, serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan.

Biaya pendidikan, termasuk dari mana sumber-sumber yang diperoleh, sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan. Biaya sebagai komponen yang sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan dampaknya tidak dapat disangkal. Salah satu masalah pokok dalam hal pembiayaan pendidikan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan operasional sekolah di satu sisi, dan di sisi lain bagaimana melindungi masyarakat, khususnya keluarga tidak mampu dari hambatan biaya untuk memperoleh pendidikan. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah meluncurkan program hibah untuk sekolah yang dikenal dengan nama Bantuan Operasional Sekolah yang telah dilaksanakan mulai pada tahun 2005. Program ini memberikan alokasi hibah kepada sekolah dan telah memberikan dampak kepada sekitar 43 juta siswa sekolah dasar dan sekolah menengah tingkat pertama di Indonesia.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah.
- b. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, di sekolah negeri maupun swasta, dan

c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Jumlah sasaran dana BOS yang dialokasikan di tingkat provinsi didasarkan pada data jumlah siswa yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipertanggung jawabkan . Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 69 tahun 2009 tentang standar biaya operasional non personalia untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs).

Adapun Perhitungan jumlah BOS untuk sekolah dilakukan dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut ini:

1. Jenjang Pendidikan SD/SDLB. Jumlah Dana BOS = jumlah peserta didik yang ada x Rp 800.000,-
2. Jenjang Pendidikan SMP/SMPLB/ Sekolah Terintegrasi/SMP Satu Atap (Satap). Jumlah Dana BOS = jumlah peserta didik yang ada x Rp 1.000.000,-
3. Jenjang Pendidikan SMA/SMALB. Jumlah Dana BOS = jumlah peserta didik yang ada x Rp 1.400.000,-
4. Jenjang Pendidikan SMK. Jumlah Dana BOS = jumlah peserta didik ada x Rp 1.400.000,-
5. Jenjang Pendidikan SLB (dengan peserta didik di dalamnya lintas jenjang)
Jumlah Dana BOS = (jumlah dari para peserta didik tingkat SD x Rp 800.000,-) + (jumlah para peserta didik di tingkat SMP x Rp 1.000.000,-) + (jumlah para peserta didik di tingkat SMA x Rp 1.400.000,-). Apabila hasil perhitungan dari jumlah dana tersebut kurang dari Rp 84.000.000,-,

maka jumlah dari dana minimal yang akan diterima oleh SLB tersebut yaitu sebesar Rp 84.000.000. (*sumber juknis BOS Tahun 2017*)

Semenjak adanya dana BOS pada tahun 2005, SMP Negeri 7 Brebes merupakan sekolah yang menerima dana BOS. Pada tahun pelajaran 2017/2018 jumlah keseluruhan siswa SMP Negeri 7 Brebes dari kelas 1,2 dan 3 sejumlah 614 siswa.

Tabel 1.1. Jumlah siswa dalam empat tahun terakhir

Tahun pelajaran	Kelas I		Kelas II		Kelas III		Jumlah Kls (I+II=III)	
	Siswa	Rombel	Siswa	Rombel	Siswa	Rombel	Siswa	Rombel
2014/2015	228	7	239	7	232	6	699	20
2015/2016	193	5	219	6	233	7	645	18
2016/2017	220	6	226	6	223	6	669	18
2017/2018	181	6	219	6	214	6	614	18

(*sumber profil sekolah tahun2017/2018*)

Di dasarkan dari juknis dana BOS tahun 2015 yang menentukan perolehan dana BOS untuk jenjang SMP persiswa sebesar 1 juta rupiah berarti perolehan dana BOS untuk SMP N 7 Brebes sejumlah 614 juta rupiah.

Dengan jumlah dana BOS yang diperoleh begitu besar, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. BOS harus menjadi sarana penting peningkatan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu, dan manajemen sekolah.

- c. Sekolah harus memiliki rencana jangka menengah yang disusun untuk periode empat tahunan
- d. Sekolah harus menyusun rencana kerja tahunan (RKT). Dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Dana BOS merupakan bagian integral didalam RKAS tersebut.
- e. Rencana jangka menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta)

Program Dana BOS diberikan kepada sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu, dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah. Jadi pada dasarnya MBS secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan disekolah.

Dalam pelaksanaan kebijakan program Dana BOS haruslah dilaksanakan seefektif mungkin sehingga tercapai tujuan dari program dana BOS tersebut. Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:174) memberikan penjelasan bahwa efektivitas merupakan tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan dalam bentuk target, sasaran jangka panjang, maupun misi organisasi. Menurut Sondang P. Siagian Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan

prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya.

Dapat di artikan efektivitas Kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai pengukuran keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah. Artinya apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif. Bantuan Operasional (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan siswa lain sehingga diharapkan dapat memperoleh pendidikan yang bermutu sampai sembilan tahun.

Namun pada realisasinya sekolah tidak menggratiskan biaya operasional sekolah pada peserta didiknya. Sekolah melalui komite menarik iuran SPP setiap bulanya kepada setiap peserta didiknya. Belum lagi pihak sekolah masih membebaskan peseta didiknya untuk membeli buku – buku penunjang belajar. Komite sekolah yang seharusnya dibentuk sebagai kontrol dalam pelaksanaan kebijakan program BOS justru didikte oleh pihak sekolah . Akibatnya pertanggungjawaban penggunaan dana BOS menjadi tidak transparan sehingga berpotensi terjadi penyelewengan. Yang pada akhirnya tujuan kebijakan BOS tidak tercapai.



Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengambil tema Efektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 7 Brebes sebagai judul skripsi.

I.2. Perumusan Masalah

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya oprasional nonoprasional bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar, yang secara umum bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar Sembilan tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah.
- Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, di sekolah negeri maupun swasta.
- Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Program Dana BOS diberikan kepada sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu, dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah. Jadi pada dasarnya MBS secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan disekolah.

SMP N 7 Brebes merupakan sekolah yang menerima dana BOS. Pada tahun pelajaran 2017/2018 jumlah keseluruhan siswa SMP N 7 dari kelas 1,2 dan kelas 3 sejumlah 614 siswa. Di dasarkan dari juknis dana BOS tahun 2017 yang menentukan perolehan dana BOS untuk jenjang SMP sebesar 1 juta rupiah berarti perolehan dana BOS untuk SMP N 7 Brebes sejumlah 614 juta rupiah.

Namun pada realisasinya sekolah tidak menggratiskan biaya operasional sekolah. Sekolah melalui komite menarik iuran SPP setiap bulanya kepada setiap peserta didiknya. Belum lagi pihak sekolah masih membebankan peseta didiknya untuk membeli buku – buku penunjang belajar. Komite sekolah yang seharusnya dibentuk sebagai kontrol dalam pelaksanaan kebijakan program BOS justru didikte oleh pihak sekolah . Akibatnya pertanggungjawaban penggunaan dana BOS menjadi tidak transparan dan berpotensi terjadi penyelewengan. Yang pada akhirnya tujuan kebijakan BOS tidak tercapai.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian meliputi sebagai berikut :

1. Bagaimana Epektifitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP N 7 Brebes?
2. Bagaimana kendala – kendala dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP N 7 Brebes ?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala – kendala dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah SMP N 7 Brebes sehingga bisa berjalan secara efektif .

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan beberapa hal yaitu:

1. Mendeskripsikan Epektifitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP N 7 Brebes
2. Mendeskripsikan kendala – kendala dalam kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP N 7 Brebes
3. Mendeskripsikan solusi pada kendala-kendala dalam penerapan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di SMP N 7 Brebes.

I.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi Ilmu Pengetahuan, hasil penelitian secara teoritis dapat dijadikan pengetahuan pemerintahan khususnya mengenai efektivitas kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dalam kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- b. Bagi Sekolah SMP N 7 Brebes, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk menerapkan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara baik dan efektif.
- c. Bagi mahasiswa pada umumnya dan khususnya mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan, hasil penelitian ini merupakan salah penerapan atas ilmu yang diperoleh selama kuliah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Kerangka Dasar Teori

Pengertian teori menurut Marx dan Goodson (1976, dalam Lexy J. Moleong, 1989) adalah aturan menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari hubungan-hubungan yang dapat diamati diantara kejadian-kejadian (yang diukur), yaitu mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian, dan hubungan-hubungan yang disimpulkan serta mekanisme dasar yang dimaksudkan untuk data dan yang diamati tanpa adanya manifestasi hubungan empiris apapun secara langsung.

Penelitian kualitatif dapat bertitik tolak dari suatu teori yang telah diakui kebenarannya dan dapat disusun pada waktu penelitian berlangsung berdasarkan data yang dikumpulkan. Pada awalnya dikemukakan teori-teori yang sesuai dengan masalah penelitian, kemudian di lapangan dilakukan verifikasi terhadap teori yang ada, mana yang sesuai dan mana yang perlu diperbaiki atau bahkan ditolak. Penelitian kualitatif mengenal adanya teori yang disusun dari data yang dibedakan atas dua macam teori, yaitu teori substantif dan teori formal (Lexy J. Moleong, 1989 dan Mubyarto, et al, 1984). Teori yang hendak dikemukakan mengenai efektivitas kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP N 7 Brebes, yang dalam bab ini dimulai dari hasil prariset dan teori hasil dari penelitian terdahulu.

II.1.1. Penelitian Terdahulu

Ni Wayan Parwati Asih, I Made Yudana, I Gusti Ketut Arya Sunu dengan judul Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Smk Teknologi Nasional Denpasar dari Program Studi Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Teknologi Nasional Denpasar dilihat dari variabel Context, Input, Process, dan Product. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga SMK Teknologi Nasional Denpasar. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 38 orang. Penelitian ini termasuk penelitian evaluatif kuantitatif menggunakan model CIPP Stufflebeam. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dokumentasi dan observasi. Data dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif. Data yang diperoleh kemudian ditransformasikan ke dalam T skor, dan dikonversikan ke dalam kuadran Glickman. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Context tidak efektif, variabel Input efektif, variabel Process efektif, dan variabel Product efektif. Secara umum berdasarkan analisis CIPP Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Teknologi Nasional Denpasar tergolong efektif. Meskipun tergolong efektif namun terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program BOS baik dari

variabel Context, Input, Process, dan Product. Untuk itu disarankan: (1) peningkatan pemahaman terhadap kebijakan terkait BOS, tujuan program BOS,(2) peningkatan sumber daya manusia, sosialisai/pelatihan, organisasi/manajemen, dan dana operasional, (3) perencanaan program secara matang, penyaluran dana harus tepat waktu, pemanfaatan dana pada kebutuhan riil, monitoring dan evaluasi dilakukan secara objektif dan berkesinambungan, (4) program peningkatan prestasi akademik dan non akademik siswa dirancang sebaik-baiknya.

II.1.2. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif artinya mempunyai efek, pengaruh atau akibat (Badudu-Zein, 2001:371). Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:174) memberikan penjelasan bahwa efektivitas merupakan tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan dalam bentuk target, sasaran jangka panjang, maupun misi organisasi.

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Atmosoeperto (2002:139) menyatakan Efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau

efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat.

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) antara lain :

a. Efektivitas Individu

Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi;

b. Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan Jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya;

c. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata “efektif” mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Menurut Sondang P. Siagian Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya. Berarti efektivitas menyoroti empat hal yaitu:

- a. Sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dapat digunakan sudah ditentukan dan dibatasi,
- b. Jumlah dan mutu barang atau jasa yang harus dihasilkan telah ditentukan ,
- c. Batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut sudah ditetapkan,
- d. Tata cara yang harus di tempuh untuk menyelesaikan tugas sudah di rumuskan.

Menurut Sondang P. Siagian (2015), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Sejalan dengan pendapat yang diatas, Abdurahmat (2003) menjelaskan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas

pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

a. Ukuran Efektivitas

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya "*Individual and Society*" yang dikutip Sudarwan Danim (2004:119), menyebutkan bahwa ukuran efektivitas adalah:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya menciptakan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intesitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Efektivitas kerja organisasi sangat tergantung dari efektivitas kerja dari orang-orang yang bekerja di dalamnya. Ada beberapa kriteria yang

dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kerja dari organisasi yang memberikan pelayanan (Sondang P.Siagian, 1996) antara lain:

1. Faktor waktu. Faktor waktu disini maksudnya adalah ketepatan waktu dan kecepatan waktu dari pelayanan yang di berikan oleh pemberi pelayanan. Hanya saja penggunaan ukuran tentang tepat tidaknya atau cepat tidaknya pelayanan yang diberikan berbeda dari satu orang ke orang lain. Terlepas dari penilaian subjektif yang demikian, yang jelas ialah faktor waktu dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran efektifitas kerja.
2. Faktor kecermatan. Faktor kecermatan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kerja organisasi yang memberikan pelayanan. Faktor kecermatan disini adalah faktor ketelitian dari pemberi pelayanan kepada pelanggan akan cenderung memberikan nilai yang tidak terlalu tinggi kepada pemberi pelayanan, apabila terjadi banyak kesalahan dalam proses pelayanan, meskipun di berikan dalam waktu yang singkat.
3. Faktor gaya pemberi pelayanan. Gaya pemberi pelayanan merupakan salah satu ukuran lain yang dapat dan biasanya digunakan dalam mengukur efektivitas kerja. Yang dimaksud dengan gaya disini adalah cara dan kebiasaan pemberi pelayanan dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Bisa saja si pelanggan tidak merasa sesuai dengan gaya pelanggan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Jika berbicara tentang sesuatu hal yang menyangkut kesesuaian, sesungguhnya apa

yang di bicarakan termasuk hal yang tidak terlepas kaitannya dengan nilai-nilai sosial yang disnut oleh orang yang bersangkutan.

b. Indikator Efektivitas

Indikator efektivitas menurut Barnard dalam Prawirosentono (1999) yang mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektivitas program. Dimensi Efektivitas Program diuraikan menjadi indikator, sebagai berikut: (1) Kejelasan tujuan program; (2) Kejelasan startegi pencapaian tujuan program; (3) perumusan kebijakan program yang mantap; (4) penyusunan program yang tepat; (5) Penyediaan sarana dan prasarana; (6) Efektivitas operasional program; (7) Efektivitas fungsional program; (8) Efektivitas tujuan program; (9) Efektivitas sasaran program; (10) Efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program; dan (11) Efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program. (<http://digilib.unila.ac.id/7197/65/BAB%20II.pdf>)

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya “*Efektrivitas Organisasi*” mengatakan mengenai indikator ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian

tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan.

Adapun pendapat yang disampaikan oleh Makmur (2011:7-9) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan – satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.

3. Ketepatan dalam pengukuran

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan.

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

5. Ketepatan berpikir

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

6. Ketepatan dalam melakukan perintah.

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan

memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

8. Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

II.1.3. Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Ada beberapa teori tentang kebijakan diantaranya yaitu menurut :

- a. Ealau dan Pewitt (1973) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut.
- b. Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu.

- c. Edi Suharto (2008:7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.
- d. Pengertian Kebijakan Menurut Noeng Muhadjir (1993: 15), kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejatheraan masyarakat. Dan dipilih kebijakan setidaknya harus memenuhi empat butir yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi) dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.
- e. Pengertian Kebijakan Menurut Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh (Syafaruddin, 2008: 75) kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city). Dapat ditambahkan, kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

- f. Kebijakan publik dalam definisi yang mashur dari Dye *adalah whatever government choose to do or not to do*. Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Interpretasi dari kebijakan menurut Dye harus dimaknai dengan dua hal penting : pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.
- g. Kebijakan menurut James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah actor aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktore dalam suatu bidang kegiatan tertentu.
- h. Hohwood dan Gunn (1988 dalam Parson. 2006-cetakan kedua:15) menyatakan bahwa terdapat 10 istilah kebijakan dalam pengertian modern, yaitu :
- 1) Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas
 - 2) Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas Negara yang diharapkan
 - 3) Sebagai proposal spesifik
 - 4) Sebagai keputusan pemerintah
 - 5) Sebagai otorisasi formal
 - 6) Sebagai sebuah program
 - 7) Sebagai output

- 8) Sebagai hasil (outcam)
- 9) Sebagai teori dan model
- 10) Sebagai sebuah proses

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa pengertian kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Kebijakan dapat di definisikan sesuai dengan teori yang mengikutinya, antara lain yaitu:

1. Teori Kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik.
2. Teori Kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah.
3. Teori Elit memandang Kebijakan pemerintah sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah.

4. Teori Rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.
 5. Teori Inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.
 6. Teori Permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing.
 7. Teori kebijakan yang lain adalah Teori Campuran yang merupakan gabungan model rasional komprehensif dan inkremental.
2. Proses Kebijakan publik

Proses kebijakan menurut William Dunn adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah

kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) diantaranya:

- 1) telah mencapai titik kritis tertentu à jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius;
- 2) telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis;
- 3) menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;
- 4) menjangkau dampak yang amat luas ;
- 5) mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ;
- 6) menyangkut suatu persoalan yang fashionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)

Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

b. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

e. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

II.1.4. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dalam buku pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada buku panduan pelaksanaan BOS yang diterbitkan setiap tahun oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama sebagai departemen yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program ini. Dalam panduan itu dijelaskan bahwa BOS adalah program pemerintah yang berasal dari realokasi dana subsidi BBM di bidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan siswa lain. Dengan BOS, siswa diharapkan dapat memperoleh pendidikan yang bermutu sampai Sembilan tahun. Sasaran program BOS adalah seluruh siswa SD dan SMP, naik negeri maupun swasta di seluruh provinsi Indonesia.

Pemerintah telah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak bulan Juli 2005 kepada seluruh sekolah setingkat Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) / Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) / dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) di Indonesia . Untuk meringankan atau menggratiskan biaya pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat yang merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal34 ayat 2 tentang wajib belajar. Semua sekolah setingkat SD/MI/SDLB/ dan SMP/MTs/SMPLB Negeri wajib menerima dana BOS. Sedangkan semua sekolah swasta yang telah memiliki izin operasional yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal wajib menerima dana BOS.

Alokasi dana untuk pendidikan harus dipersiapkan sejak awal, bervariasinya bentuk sekolah membuat penerapan standar biaya dan pendanaan pendidikan menjadi sulit. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan (Bastian, 2007). Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 (Bastian, 2007) tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 juga menguraikan jenis-jenis biaya pendidikan yaitu:

1. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi;
 - a. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
 - b. Biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia.
 - c. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain.
 - d. Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
 - e. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten / kota, atau penyelenggaraan / satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Selama ini sekolah hanya memiliki laporan-laporan dan surat-surat pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Sekarang setelah sekolah menerima dana BOS diharapkan memiliki laporan pertanggungjawaban, termasuk laporan nama-nama siswa miskin yang dibebaskan dari segala iuran, format rencana pengambilan dana, laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah, laporan pelaksanaan perawatan ringan / pemeliharaan sekolah, laporan pajak penggunaan dana BOS, dan laporan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten / kota.

Informasi yang diperoleh dari laporan pertanggungjawaban tersebut diharapkan menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan agar berguna dalam pengambilan keputusan dalam entitas pendidikan. Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah menggunakan informasi tersebut untuk menyusun perencanaan sekolah yang dipimpinnya, mempertanggungjawabkan kemajuan yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan. Kepala sekolah dalam mengelola dana BOS menunjuk seorang guru disekolahnya untuk menjadi bendahara, hal ini sesuai dengan buku panduan operasional sekolah dimana seorang guru ditunjuk sebagai bendahara. Sehingga kepala sekolah bukan bendahara

melainkan pimpinan sekolah yang mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Bendahara dalam penelitian ini adalah seorang guru atau karyawan yang diberi tugas tambahan dari tugas pokoknya mencatat rencana kerja, menerima dana, memungut pajak, membayar, dan membuat laporan penggunaan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana BOS.

Beberapa tugas dan tanggung jawab sekolah yang diatur di dalam buku panduan BOS meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan penggunaan dana BOS tahun anggaran 2017 antara lain (Permendikbud No. 51, 2011);

a. Perencanaan

- a. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada.
- b. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS.
- c. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS.

- b. Pengelolaan
 - a. Tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar.
 - b. Mengelola dana BOS secara transparan dan bertanggung jawab dengan cara mengumumkan besar dana yang diterima dan rencana penggunaan dana BOS di awal tahun pelajaran.
 - c. Mengumumkan hasil pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh sekolah.
 - d. Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah, baik yang berasal dari dana BOS maupun dari sumber lain.
 - e. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan.
- c. Pelaporan
 - a. Membuat laporan nama-nama siswa miskin yang digratiskan.
 - b. Membuat laporan jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaan dana.
 - c. Melaporkan lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 - d. Melaporkan pencatatan pengaduan.
 - e. Laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut disampaikan setiap triwulan, semester, dan tahunan.

II.2 Definisi Konsep

Efektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diartikan sebagai pengukuran keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah. Artinya apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif. Bantuan Operasional (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan siswa lain sehingga diharapkan dapat memperoleh pendidikan yang bermutu sampai Sembilan tahun. Pelaksanaan kebijakan Dana Operasional Sekolah (BOS) didasarkan pada Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

II.3 Pokok-pokok Penelitian

Efektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan ukuran keberhasilan realisasi kebijakan BOS di SMP Negeri 7

brebes yang di ukur / dicermati. Indikator efektivitas menurut Barnard dalam Prawirosentono (1999) yang mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan program yang telah ditetapkan. Dimensi Efektivitas Program diuraikan menjadi indikator, sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
 - a. Dasar tujuan kebijakan BOS yang telah di tetapkan.
 - b. Tujuan yang akan dicapai dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 7 Brebes sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
 - a. Strategi SMP Negeri 7 Brebes untuk mencapai tujuan dari program bantuan operasional sekolah (BOS).
 - b. Capaian tujuan kebijakan BOS SMP N 7 Brebes dalam setiap semester dan capaian dalam setiap tahun.
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
 - a. Proses analisis dan perumusan yang dilakukan dalam pengelolaan BOS di SMP Negeri 7 Brebes.
 - b. Hasil perumusan kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
4. Perencanaan yang matang
 - a. Perencanaan pengelolaan BOS yang dilakukan.
 - b. Tahapan kegiatan dalam pengelolaan BOS.

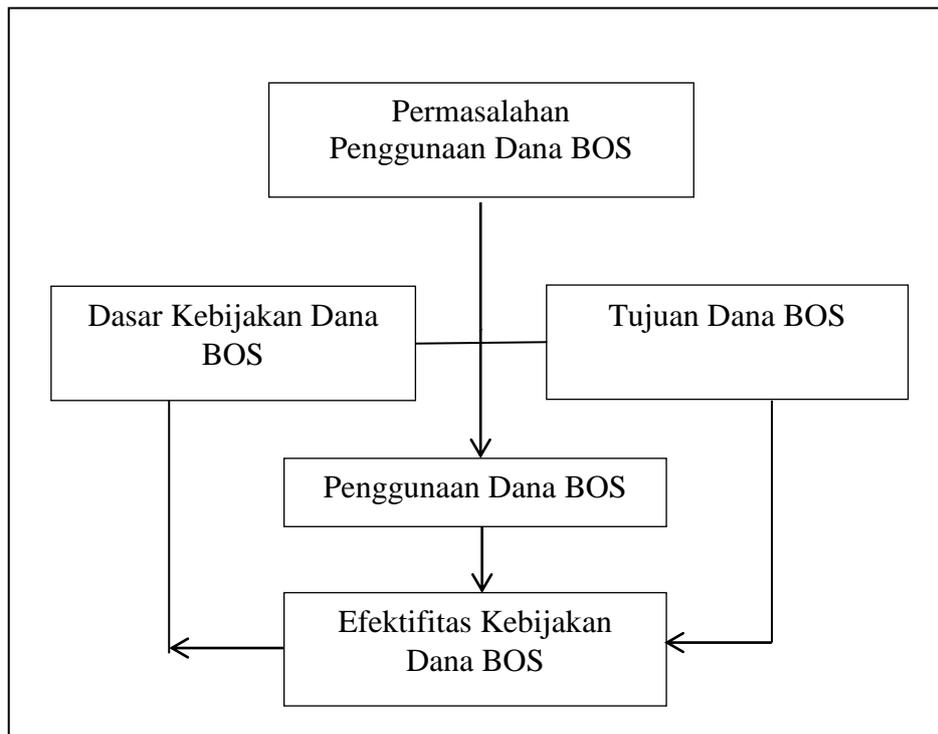
5. Penyusunan program yang tepat
 - a. Kegiatan penyusunan Program kegiatan penggunaan dana BOS.
 - b. Realisasi program kebijakan BOS.
6. Tersedianya sarana dan prasarana
 - a. Sumber daya manusia pengelola BOS.
 - b. Sarana dan prasarana penunjang yang digunakan dalam pengelolaan dana BOS.
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
 - a. Pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan dana BOS.
 - b. Pelaporan penggunaan dana BOS yang dilakukan.

II.4 Alur Pikir Penelitian

Alur pikir merupakan langkah-langkah berpikir yang mempengaruhi penelitian yang digambarkan secara menyeluruh dan sistematis untuk mempelajari teori yang mendukung penelitian tersebut. Adapun alur pikir mengenai Efektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Alur Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Tipe Penelitian.

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif mendeskripsikan data-data secara naratif fenomena sosial tentang Efektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP N 7 Brebes. Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. (Lexy J. Moleong, 2002).

Penelitian Kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Karakteristik penelitian kualitatif adalah datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

III.2. Jenis dan Sumber Data

III.2.1. Jenis Data

Menurut Sugiyono (2015:7) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya akan lebih banyak berkaitan dengan efektivitas kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri 7 Brebes.

III.2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) data Primer, data yang dibutuhkan berkaitan dengan penggunaan dan Bantuan Operasional Sekolah ; (2) data sekunder, merupakan data yang telah diolah dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer. Data ini dapat diperoleh dari hasil penelitian, artikel baik dari media cetak maupun elektronik, pustaka dan dokumen.

III.3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Dalam penelitian ini informan yang dimaksud adalah orang yang dianggap memahami tentang Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP N 7 Brebes. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala

Sekolah, Bendahara Sekolah, Guru, Kepala Tata Usaha, Ketua Komite Sekolah, Bendahara Komite Sekolah, dan 2 orang Wali Murid.

III.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2015). Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan pengukuran (Widoyoko, 2012:51). Instrumen dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan observasi. Pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respons (responden). Atau daftar pertanyaan yang diberikan kepada informan (orang yang diwawancarai) untuk memberikan jawaban, atau pendapat, serta pandangan. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara dengan informan atau orang yang diinterview dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai efektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP N 7 Brebes.

Data yang diperoleh dalam wawancara senantiasa dapat diperhalus, dirinci dan diperdalam (disebut *soft data*) karena masih

dapat mengalami perubahan. Data yang diperoleh dalam kualitatif masih bersifat lunak, maka tidak bisa segera disebut fakta yang keras yang tidak dapat disangkal kebenarannya. Untuk itu setiap data perlu dicek lagi kebenarannya dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang lain.

b. Observasi

Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti yaitu Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP N 7 Brebes. J.P Spradley (dalam Nasution, 2008) dalam tiap situasi terdapat tiga komponen yakni ruang (tempat), pelaku (aktor) dan kegiatan (aktivitas). Dari ketiga dimensi tersebut dapat diperluas sehingga yang dapat diamati adalah :

- 1) Ruang (tempat) dalam aspek fisiknya
- 2) Pelaku, yaitu semua orang yang terlibat dalam situasi
- 3) Kegiatan, yaitu apa yang dilakukan orang dalam situasi itu
- 4) Objek, yaitu benda-benda yang terdapat di tempat itu
- 5) Perbuatan, tindakan-tindakan tertentu
- 6) Kejadian atau peristiwa, yaitu rangkaian kegiatan
- 7) Waktu, urutan kegiatan
- 8) Tujuan, apa yang ingin dicapai orang, makna perbuatan orang
- 9) Perasaan, emosi yang dirasakan dan dinyatakan.

Kesembilan dimensi itu dapat saling dikombinasikan, misalnya ruang-pelaku, ruang-kegiatan, ruang-objek, dan sebagainya, sehingga peneliti memperoleh matriks yang terinci mengenai hal-hal yang dapat menjadi fokus pengamatan peneliti.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Hal ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain (Sugiyono, 2012:329).

III.5. Teknik dan Analisis Data

Analisis data dipahami sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis itu dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Analisis data kualitatif adalah upaya yang

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data dalam satuan yang dapat dikelola.

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum kita melakukan penelitian sebenarnya, atau dengan kata lain sebelum kita terjun untuk mengumpulkan data di lapangan. Analisis dilakukan terhadap data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

2. Analisis Selama dan Setelah di Lapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang kredibel. Secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data banyak menggunakan model analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang sering disebut dengan metode analisis data interaktif. Mereka mengungkapkan bahwa aktivitas dalam

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verivication* (Sugiyono, 2012: 91).

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya (Sugiyono, 2012: 92).

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Dengan penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono, 2012: 95).

3) *Conclusion Drawing/verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2012: 99). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB IV

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum lokasi penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Disisi lain pentingnya mengetahui obyek penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik

IV. 1. PROFIL SEKOLAH

SMP Negeri 7 Brebes beralamatkan di Desa Kedunguter, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dengan nomor telepon/HP 08157702921. SMP Negeri 7 Brebes didirikan pada tahun 1994 dengan nama SMP Negeri 7 Brebes dengan SK Pendirian sekolah (Perubahan UBM – SMP N 7 Brebes) Nomor : 0260/0/th.1994 Tanggal 5 Oktober 1994.

SMP Negeri 7 Brebes berdiri di atas tanah dari pemerintah dengan luas 13.460 m² / hak milik, karena merupakan sekolah negeri, memiliki bangunan yang kokoh dan luas 2.744 m² dengan dilengkapi berbagai fasilitas yang menunjang proses belajar mengajar. Dengan lingkungan yang bersih menjadikan peserta didik nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain itu di SMP Negeri 7 Brebes juga terdapat sarana dan prasarana yang memadai, menjadikan SMP Negeri 7 Brebes mampu meningkatkan etos kerja yang lebih peduli terhadap perkembangan peserta didik.

Selain itu, guru sangat diperlukan demi berlangsungnya pelaksanaan pendidikan, dimana merupakan fasilitator pembelajaran. Peserta didik sangat membutuhkan pengarahan yang lebih ahli dalam pembelajaran. Di sinilah peran guru untuk mengarahkan peserta didik dalam belajar. SMP Negeri 7 Brebes, mempunyai guru-guru yang berkompeten di bidangnya agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi peserta didik. Jumlah seluruh guru adalah 34 orang dengan rincian 15 orang guru tetap (PNS) dan 19 orang guru tidak tetap (Non PNS). Dari segi profesionalismenya pun cukup mumpuni karena kebanyakan lulusan sarjana (S1), sebagian kecil pun terdapat 2 orang lulusan S2. Sementara seluruh siswa SMP 7 Brebes berjumlah 614 siswa, dengan rincian kelas VII: 94, Kelas VIII: 219, Kelas IX: 214.

Adapun profil lengkap SMP Negeri 7 Brebes adalah sebagai berikut:

1. Identitas Sekolah

- a. Nama Sekolah : SMP Negeri 7 Brebes
- b. NPSN / NSS : 20326503 / 201032917071
- c. Jenjang Pendidikan : SMP
- d. Status Sekolah : Negeri
- e. Tipe Sekolah : Sekolah Induk
- f. Kategori Sekolah : Reguler

2. Lokasi Sekolah

- a. Alamat : Desa Kedunguter, Kec. Brebes, Kab. Brebes
- b. RT/RW : 06/01
- c. Desa : Kedunguter

- d. Kecamatan : Brebes
- e. Kabupaten : Brebes
- f. Provinsi : Jawa Tengah
- g. Telepon / Hp : 08157702921
- h. Kode Pos : 52251

3. Data Pendukung

1. SK Pendirian sekolah (Perubahan UBM – SMP N 7 Brebes)

Nomor : 0260/0/th.1994

Tanggal : 5 Oktober 1994

2. Status Kepemilikan : Milik Pemerintah

Luas tanah / status : 13.460 m² / hak milik

Luas Bangunan : 2.744 m²

3. SK Izin Operasional

Nomor : 0260/0/th.1994

Tanggal : 5 Oktober 1994

4. SK Akreditasi

Nomor : 137/BAP-SM/X/2014

Tanggal : 12/10/2014

Nilai : B

5. Rekening Sekolah (BOS):

Nomor Rekening : 2.028.08509.8

Atas Nama : SMPN 7 Brebes

Nama Bank : Bank Jateng Brebes

Pemegang Rekening : Bendahara BOS

NPWP : 3028051701

4. Data Kepala Sekolah

a. Nama : Dahudin, S.pd., MPd

b. NUPTK : 1254.7396.4220.0003

c. NIP : 19610922 198501 1 002

d. SK Pengangkatan

Nomor : 821.2/911/2008

Tanggal : 29 Agustus 2008

e. Sertifikat Kepala Sekolah

NUKS : -

Tanggal : -

f. Pangkat Gol Ruang : Pembina, IV/a

g. Alamat : Jl.Raya Klampok Rt.03 Rw.07 Kec. Wanasari
Kab. Brebes

h. No.Telp Hp : 085226983400

5. Ketua Komite Sekolah

a. Nama : Drs, Karsono.S.sos

b. Alamat : Desa Sigambir Kec. Brebes Kab. Brebes

c. No. HP : -

6. Siswa

Siswa atau murid merupakan komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya di proses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. SMP Negeri 7 Brebes adalah Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Brebes dengan nilai akreditasi B. Setiap tahun ajaran sekolah harus menyeleksi dengan teliti setiap calon siswanya yang mendaftar.

Adapun perolehan pendaftaran siswa di SMP Negeri 7 Brebes dari data 3 tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel IV.1. Jumlah Pendaftar (Siswa Baru) dalam 3 tahun terakhir

Tahun Pelajaran	Daya Tampung		Pendaftar			Diterima			Nilai NEM (4 MP)		
	Siswa	Rombel	L	P	Jml	L	P	Jml	Rt	Tg	Rd
2016/2017	252	6	98	95	193	98	95	193	207,6	265,5	113,5
2017/2018	220	6	120	100	220	120	100	220	202,5	278,5	202,5
2018/2019	181	6	101	80	181	101	80	181	204,5	279,5	200,5

Sumber : Profil Sekolah SMP N 7 Brebes

Melihat dari tabel diatas, bahwa penerimaan peserta didik di SMP Negeri 7 Brebes dalam 3 tahun terakhir mengalami naik turun (fluktuatif) setiap tahunnya.

a. Jumlah Siswa dalam 4 (empat) tahun terakhir

Untuk menjaga kualitas belajar mengajar dalam kelas, Jumlah keseluruhan peserta didik siswa SMP N 7 Brebes di bagi dalam satu

rombongan belajar (rombel). Dan jumlah rombel dalam satu kelas berjumlah rata-rata 32 siswa.

Adapun data jumlah siswa dari kelas I, II dan III SMP Negeri 7 Brebes yang terbagi dalam beberapa rombel dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel IV.2. Jumlah Siswa dalam 4 (empat) tahun terakhir

Tahun Pelajaran	Kelas I		Kelas II		Kelas III		Jumlah (Kelas I + II + III)	
	Siswa	Rombel	Siswa	Rombel	Siswa	Rombel	Siswa	Rombel
2015/2016	228	6	239	6	232	6	699	18
2016/2017	193	6	219	6	233	6	645	18
2017/2018	220	6	226	6	223	6	669	18
2018/2019	191	6	219	6	214	6	614	18

Sumber : Profil Sekolah SMP N 7 Brebes

b. Jumlah Kelulusan dalam 4 (empat) tahun terakhir

Seperti pada SMP pada umumnya, SMP Negeri 7 Brebes meluluskan siswa 1 kali dalam satu tahun siswa, setelah siswa menempuh pembelajaran selama 3 tahun. Jumlah kelulusan SMP Negeri 7 Brebes dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel IV.3. Jumlah Kelulusan dalam 4 (empat) tahun terakhir

Tahun Pelajaran	Jumlah Siswa			Lulus	Tidak Lulus	% Kelulusan
	L	P	Jml			
2015/2016	111	98	209	209	-	100%
2016/2017	97	96	193	193	-	100%
2017/2018	123	109	232	232	-	100%
2018/2019	94	129	223	223	-	100%

Sumber : Profil Sekolah SMP N 7 Brebes

c. Jumlah Siswa Melanjutkan dalam 4 (empat) tahun terakhir

Sekolah Menengah Pertama merupakan jenjang tingkatan sekolah menengah setelah menempuh sekolah tingkat Dasar. Setelah menempuh jenjang SMP siswa melanjutkan ke jenjang sekolah Lanjutan tingkat atas atau di singkat SLTA. Keadaan jumlah siswa SMP N 7 Brebes yang melanjutkan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.4. Jumlah Siswa Melanjutkan dalam 4 (empat) tahun terakhir

Tahun Pelajaran	Jml Kelulusan	Melanjutkan						Tanpa Keterangan
		SMA	SMK	MA	Lainnya	Jml	%	
2015/2016	209	122	50	10	8	190	89%	24
2016/2017	193	63	85	10	15	173	87%	20
2017/2018	241	78	98	15	20	211	90%	30
2018/2019	223	51	102	20	25	198	90%	25

Sumber : Profil Sekolah SMP N 7 Brebes

d. Data Kenaikan Kelas

Kenaikan kelas siswa adalah perubahan status numeric pada siswa setelah melaksanakan serangkaian penilaian dari guru dalam proses pembelajaran selama satu tahun. Data kenaikan kelas siswa SMP Negeri 7 Brebes dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel IV.5. Data Kenaikan Kelas

Tahun Pelajaran	Kelas VII			Kelas VIII			Kelas VII + VIII		
	Jml Siswa	Naik	Tidak Naik	Jml Siswa	Naik	Tidak Naik	Jml Siswa	Naik	Tidak Naik
2014/2015	239	-	-	214	-	-	453	453	-
2015/2016	240	239	1	232	232	-	472	471	1
2016/2017	220	219	1	234	233	1	454	452	2
2017/2018	188	188	-	215	213	2	403	401	2
2018/2019	214	214	-	240	240	-	454	454	-

Sumber : Profil Sekolah SMP N 7 Brebes

e. Jumlah Siswa Drop-Out

Istilah siswa drop out adalah siswa yang tidak mampu mengikuti proses kegiatan belajar mengajar dari pada system pembelajaran yang digunakan di sekolah . berikut jumlah data siswa drop out di SMP

Negeri 7 Brebes :

Tabel IV.6. Jumlah Siswa Drop-Out

Tahun Pelajaran	Kelas VII			Kelas VIII			Kelas IX			Jumlah Seluruh		
	Jml Siswa	DO	% DO	Jml Siswa	DO	% DO	Jml Siswa	DO	% DO	Jml Siswa	DO	% DO
2014/2015	209	-	0%	214	-	0%	218	-	0%	965	-	0%
2015/2016	241	1	2,1%	232	-	0%	209	-	0%	969	1	0,1%
2016/2017	239	1	0,1%	241	1	0,1%	193	-	0%	985	2	0,2%
2017/2018	240	-	0%	239	2	0,2%	241	-	0%	984	2	0,2%
2018/2019	224	6	0,6%	192	7	0,7%	213	-	0%	629	13	0,13%

Sumber : Profil Sekolah SMP N 7 Brebes

7. Prestasi Sekolah / siswa dalam 4 (empat) tahun terakhir

Prestasi akademik adalah istilah untuk menunjukkan suatu pencapaian tingkat keberhasilan tentang suatu tujuan karena suatu usaha belajar telah dilakukan oleh seorang siswa secara optimal. Data prestasi akademik siswa SMP Negeri 7 Brebes sebagai berikut :

a. Prestasi Akademik NUN

Tabel IV.7. Prestasi Akademik NUN

Tahun Pelajaran	Rata –rata NUN					
	B.Ind	B.Ing	Mat	IPA	Jumlah	Rata-rata
2016/2017	6,22	4,40	3,69	4,42	18,73	4,68
2017/2018	63,16	42,01	36,85	40,51	182,53	45,63
2018/2019	65,09	38,34	30,82	40,19	174,44	43,61

Sumber : Profil Sekolah SMP N 7 Brebes

b. Prestasi Akademik : Peringkat rerata NUAN

Tabel IV.8. Prestasi Akademik : Peringkat rerata NUAN

NO.	Tahun Pelajaran	Peringkat								
		Tingkat Kec.(Rayon)			Tingkat Kab/Kota			Tingkat Propinsi		
		N	S	N+S	N	S	N+S	N	S	N+S
1	2015/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2016/2017	-	-	-	74	-	123	1612	-	2633
3	2017/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2018/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Profil Sekolah SMP N 7 Brebes

c. Prestasi Akademik Nilai Ujian Sekolah

Tabel IV.9. Prestasi Akademik Nilai Ujian Sekolah

NO.	Mata Pelajaran	Rata-rata Nilai US				
		2012/2013	2012/2013	2012/2013	2012/2013	2012/2013
1	PAI	8,86	9,64	73,63	88,9	85
2	PKn	9,27	9,16	78,65	81,0	82
3	Bahasa Indonesia	8,78	9,78	84,68	84,7	82
4	Matematika	8,70	9,54	65,04	82,5	72
5	Bahasa Inggris	9,56	9,80	69,00	81,1	81
6	IPA	9,22	9,71	73,90	83,9	78
7	IPS	9,20	9,19	79,60	79,9	77
8	Seni Budaya	8,90	9,21	79,32	86,9	85
9	Penjaskes	9,10	9,74	85,77	84,3	85
10	TIK	9,15	9,57	-	-	-
11	Bahasa Jawa	8,71	9,57	87,80	85,7	82
12	PKK	8,88	9,57	78,86	84,8	86
	Rata-rata	9,02	9,57	78,57	84,35	81

Sumber : Profil Sekolah SMP N 7 Brebes

8. Data Pendidikan Tenaga Kependidikan

a. Jumlah Pendidikan Tenaga Kependidikan

Guru sangat diperlukan demi berlangsungnya pelaksanaan pendidikan, dimana merupakan fasilitator pembelajaran. Peserta didik sangat membutuhkan pengarahannya yang lebih ahli dalam pembelajaran. Di sinilah peran guru untuk mengarahkan peserta didik dalam belajar.

SMP Negeri 7 Brebes, mempunyai guru-guru yang berkompeten di bidangnya agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi peserta didik. Jumlah seluruh guru adalah 34 orang dengan rincian 15 orang guru tetap (PNS) dan 19 orang guru tidak tetap (Non PNS). SMP Negeri 7 Brebes dalam operasionalnya di bantu 5 Orang Tenaga Tata Usaha, 2 orang pustakawan, tenaga kebersihan 2 orang, penjaga malam sekolah 1 orang serta satpam 1 orang.

Dari segi profesionalisme guru cukup mumpuni karena kebanyakan lulusan sarjana (S1) atau D4, sebagian kecil pun terdapat lulusan S2 berjumlah 2 Orang.

Berikut tabel data pendidik/guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 7 Brebes :

Tabel IV.10. Jumlah Pendidikan Tenaga Kependidikan

No.	PTK	Status						JML
		PNS			Non-PNS			
		L	P	Jml	L	P	Jml	
1	Guru	6	9	15	6	13	19	34
2	TAS	1	-	1	-	4	4	5
3	Petugas Layanan Khusus	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	7	9	16	6	13	19	39

Sumber : Profil Sekolah SMP N 7 Brebes

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah guru SMP Negeri 7 Brebes secara keseluruhan ada 34 orang, dengan rincian guru PNS sejumlah 15 orang dan Non PNS sejumlah 19 orang dan dibantu tenaga kependidikan sebanyak 5 orang.

b. Kepala Sekolah

Kepala sekolah merupakan guru yang diberi tambahan untuk memimpin sekolah yang diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala sekolah.

Berikut data kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SMP Negeri 7 Brebes :

Tabel IV.11. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah

No.	KS/Wakasek	Nama	JK		Usia (Thn)	Pendidik (Thn)	Gas MK (Thn)
			L	P			
1	Kepala Sekolah	Dahudin, S.Pd., M.Pd.	L	-	58	S-2	35
2	Wakasek 1	Dra. Umi Prastiwi	-	P	50	S-1	25

Sumber : Profil Sekolah SMP N 7 Brebes

c. Guru

1) Kualifikasi Pendidikan

SMP Negeri 7 Brebes, mempunyai guru-guru yang berkompeten di bidangnya agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi peserta didik. Jumlah seluruh guru adalah 34 orang dengan rincian 15 orang guru tetap (PNS) dan 19 orang guru tidak tetap (Non PNS).

Dari segi profesionalisme guru cukup mumpuni karena kebanyakan lulusan sarjana (S1) atau D4, sebagian kecil pun terdapat lulusan S2 berjumlah 2 Orang. Berikut data kualifikasi guru SMP Negeri 7 Brebes :

Tabel IV.12. Kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Status						JML
		PNS			Non-PNS			
		L	P	Jml	L	P	Jml	
1	S-3	-	-	-	-	-	-	-
2	S-2	1	1	2				2
3	S-1/D-IV	5	8	13	6	13	19	32
1	D-3	-	-	-	-	-	-	-
2	D-2	-	-	-	-	-	-	-
3	D-1	1	-	1	-	-	-	1
	Jumlah	7	9	16	6	13	19	35

Sumber : Profil Sekolah SMP N 7 Brebes

2) Jumlah Guru Berdasarkan Pangkat/Golongan

Tabel IV.12. Jumlah Guru Berdasarkan Pangkat/golongan

No	Pangkat/Gol	PNS		
		L	P	J
1	Pembina Tk 1 / IV B	-	-	-
2	Pembina / IV A	3	4	7
3	Penata / III C	1	1	2
4	Penata Muda Tk / III B	2	4	6
5	Penata Muda / III A	-	1	1
	Jumlah	6	10	16

Sumber : Profil Sekolah SMP N 7 Brebes

3) Jumlah Guru Bersertifikasi Pendidikan

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi sangat diperlukan guna memastikan guru memiliki kemampuan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi

pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Berikut data guru bersertifikat SMP Negeri 7 Brebes :

Tabel IV.13. Jumlah Guru Bersertifikat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS			Non-PNS			JML
		L	P	Jml	L	P	Jml	
1	Guru Bersertifikat	6	7	13	-	-	-	-
2	Non-Sertifikasi		3	3	-	1	1	-
	Jumlah Guru	6	10	16	-	1	1	-
	%Guru Sertifikasi	-	-	73%	-	-	0%	-

Sumber : Profil Sekolah SMP N 7 Brebes

4) Guru dengan Tugas Mengajar Sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan

Keaadaan guru dengan tugas mengajar yang sesuai dengan latar belakang Pendidikan di SMP Negeri 7 brebes dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel IV.14. Guru dengan Tugas Mengajar Sesuai dengan Latar Belakang Sekolah

No.	Guru	Sesuai dengan tugas mengajar				TIDAK sesuai dengan tugas mengajar				Jumlah
		D1/D2	D3/	S1/D4	S2/S3	D1/D2	D3/	S1/D4	S2/S3	
1.	PA dan Budi Pekerti	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2.	PPKn	-	-	1	-	-	-	-	-	1
3.	Bahasa Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Matematika	-	-	3	-	-	-	-	-	3
5.	IPA	-	-	1	1	-	-	-	-	2
6.	IPS	-	-	2	-	-	-	-	-	2

7.	Bahasa Inggris	-	-	3	-	-	-	-	-	3
8.	Seni Budaya	-	-	1	-	-	-	-	-	1
9.	PJOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Prakarya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Bahasa Jawa	-	-	1	-	-	-	-	-	1
12.	Bimbingan Konseling	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	-	-	14	1	-	-	-	-	15

Sumber : Profil Sekolah SMP N 7 Brebes

5) Pengembangan Kompetensi Profesionalisme dalam 4 tahun terakhir

Guru merupakan pekerjaan professional, memerlukan suatu keahlian khusus sehingga di perlukan kompetensi yang professional. Peningkatan kompetensi guru dapat dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang. Berikut data pengembangan kompetensi profesionalisme guru SMP N 7 Brebes dalam 4 tahun terakhir :

Tabel IV.15. Pengembangan Kompetensi Profesionalisme dalam 4 tahun terakhir

No.	Jenis Pengembangan	Jumlah Guru		
		L	P	J
1	Diklat Kurikulum	13	-	-
2	Penataran Metode Pembelajaran	-	-	-
3	Bintek PTK/PTBK/Karya Ilmiah	-	-	-
4	Seminar Pendidikan	-	-	-

Sumber : Profil Sekolah SMP N 7 Brebes

9. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Data tenaga kependidikan SMP Negeri 7 Brebes sebagaimana berikut :

Tabel IV.16. Tenaga Kependidikan

No	Tenaga Pendukung	Jumlah tenaga pendukung dan kualifikasi pendidikan						Jumlah Tenaga Pendukung Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin				Jml
		SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	PNS		Non-PNS		
								L	P	L	P	
1.	TAS		5					1			4	5
2.	Pustakawan				1		1				2	2
3.	Laporan lab. IPA											
4.	Teknisi lab. Komp.											
5.	Laboran lab. Bhs											
6.	Penjaga Sekolahh		1							1		1
7.	Tkg Kebun/Kebersihan		2							2		2
8.	Keamanan/satpam		1							1		1
	Jumlah		9							4		13

Sumber : Profil Sekolah SMP N 7 Brebes

10. Perolehan NUM

Data perolehan NUM siswa SMP Negeri 7 Brebes dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV.17. Perolehan NUM

Tahun Pelajaran	Mapel	Perolehan N U M			%Kelulusan
		Tertinggi	Terendah	Rata-rata	
2016/2017	Bahasa Indonesia	94.00	30.00	66.09	100%
	Bahasa Inggris	78.00	24.00	42.22	
	Matematika	77.50	20.00	36.28	
	IPA	82.50	20.00	42.47	
2017/2018	Bahasa Indonesia	90.00	22.00	64.21	100%
	Bahasa Inggris	78.00	18.00	37.36	
	Matematika	65.00	10.00	31.10	
	IPA	75.00	17.50	39.57	
2018/2019	Bahasa Indonesia	80.00	26.00	55.94	100%
	Bahasa Inggris	52.00	22.00	34.02	
	Matematika	70.00	22.50	36.30	
	IPA	67.50	22.50	40.52	

Sumber : Profil Sekolah SMP N 7 Brebes

11. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan Prasarana dalam pengertian yang luas dapat mencakup semua peralatan yang diperlukan oleh siswa, Sarana dan Prasarana sangat penting bagi suatu lembaga, karena dengan adanya sarana dan prasarana semua kegiatan belajar mengajar akan menjadi lancar. Aktifitas sekolah dapat berjalan dengan baik pula, apabila didukung adanya sarana dan prasarana yang memadai, dan adapun untuk mengetahui sarana dan prasarana pendidikan di SMP Negeri 7 Brebes yang relatif sudah memadai antara lain :

Tabel IV.18. Sarana dan Prasarana

No	Bangunan	Jumlah	Kondisi
1.	R. Kep. Sekolah		
2.	R. Tata Usaha	1	Baik
3.	R. Wakil Kepala Sekolah	1	Baik
4.	R. BP	1	Baik
5.	R. Guru	1	Baik
6.	R. Perpustakaan	1	Baik
7.	R. Kelas Siswa	25	Baik
8.	R. Lab Bahasa	1	Baik
9.	R. Lab. Komputer	1	Baik
10.	R. Lab. IPA	1	Baik
11.	Musholla	1	Baik
12.	R. PMR	1	Baik
13.	R. Osis	1	Baik
14.	R. Koperasi Siswa	1	Baik
15.	R. Sarana Olah Raga	1	Baik
16.	R. Penjaga Sekolah	1	Baik
17.	WC Guru	1	Baik
18.	WC siswa	2	Baik
19.	Kantin	2	Baik
20.	Gudang	1	Cukup
21.	Ruang Tamu	1	Baik

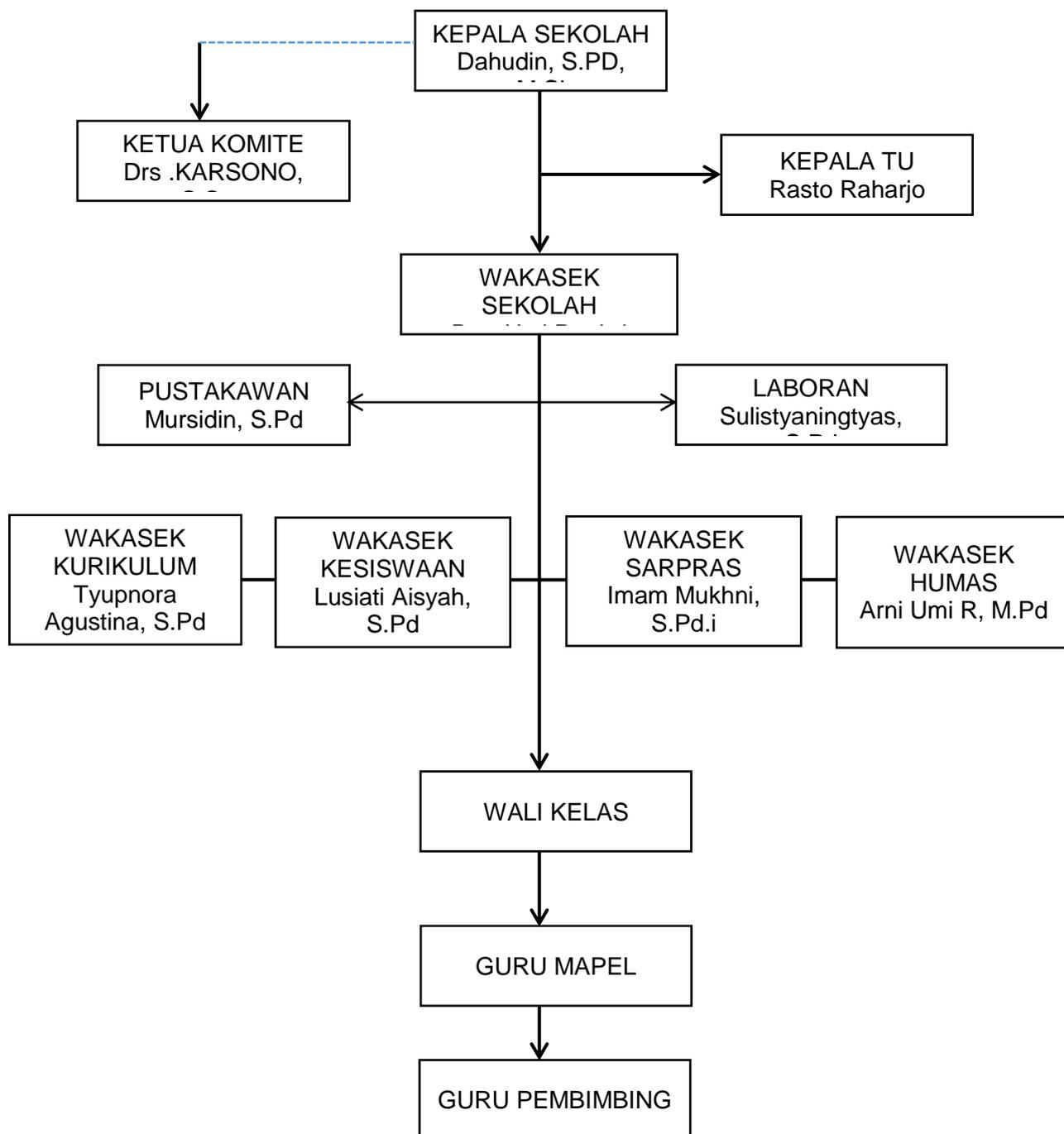
Sumber : Profil Sekolah SMP N 7 Brebes

12. Srtuktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka atau susunan yang menunjukkan hubungan antar komponen yang satu dengan yang lainnya, hingga jelas tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu lembaga.

Adapun bagan struktur organisasi SMP Negeri 7 Brebes
sebagaimana dalam gambar dibawah ini. :

Gambar IV.1. Struktur Organisasi SMP N 7 Brebes



Sumber : Profil Sekolah SMP N 7 Brebes

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.1. Hasil Penelitian

V.1.1. Efektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 7 Brebes. Pada bab ini penulis akan menyajikan laporan hasil penelitian meliputi identitas informan dan deskripsi Efektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 7 Brebes.

Efektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan ukuran keberhasilan realisasi kebijakan BOS di SMP Negeri 7 brebes yang di ukur / dicermati. Indikator efektivitas menurut Barnard dalam Prawirosentono (1999) yang mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan program yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara dari informan mengenai efektifitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 7 Brebes dengan menggunakan indikator - indikator penelitian yang telah dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Terkait dengan kejelasan tujuan yang hendak dicapai dari program BOS yang diperoleh SMP Negeri 7 Brebes.
 - a. Apakah pihak sekolah mengetahui dasar kebijakan BOS ?

Di utarakan oleh Bapak Dahudin, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP N 7 Brebes mengenai dasar kebijakan BOS :

“ya mas... saya selaku kepala sekolah tahu dasar kebijakan BOS, dasar kebijakan BOS itu kan dari peraturan menteri Dalam Negeri dan Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan Sekolah dalam hal Dana BOS hanya melaksanakan yang ada pada peraturan tersebut. “

Dra. Umi Prastiwi selaku Wakil Kepala Sekolah mengatakan :

“yang saya ketahui dasar kebijakan BOS berdasarkan peraturan menteri keuangan, permendagri dan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan ...”

Rima Maryati, S.Pd selaku Bendaha BOS menyampaikan :

“ yang saya ketahui dasar kebijakan BOS ada pada peraturan – peraturan pemerintah yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang BOS ...”

Dikatakan oleh Vivi , S.Pd selaku Guru SMP N 7 Brebes, dia mengatakan :

“ya saya tahu mas... Dasar kebijakan BOS tertuang pada peraturan menteri keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dan BOS dari Kas Umum Negara ke Kas umum Daerah serta pelaporannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS dari kas daerah ke sekolah dan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian dana BOS dan penggunaan dana BOS di Sekolah “

Karsono, S.Sos selaku Ketua Komite SMP N 7 Brebes , mengatakan :

“tahu mas.....Dasar kebijakan BOS tertuang pada peraturan menteri keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dan BOS dari Kas Umum Negara ke Kas umum Daerah serta pelaporannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS dari kas daerah ke sekolah dan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian dana BOS dan penggunaan dana BOS di Sekolah “

Menurut Illah Krisnawati, S.Pd sebagai Bendahara Komite, menjawab :

“tahu mas.....Dasar kebijakan BOS ada pada peraturan menteri dalam negeri dan peraturan menteri pendidikan dan Kebudayaan mengenai juluk dan juknis pengelolaan dana BOS.”

Selain itu menurut Darsinah selaku wali siswa SMP Negeri 7 Brebes, mengatakan :

“ saya tidak tahu mas..., bagi saya sih yang penting anak saya sekolah dn dengan biaya yang ringan...”

- b. Apa saja tujuan yang akan dicapai dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 7 Brebes ?

Di utarakan oleh Bapak Dahudin, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP N 7 Brebes, dia menjawab :

“ saya baca yah mas....secara normative tujuan BOS pada SMP yang telah dicanangkan oleh pemerintah yaitu untuk :

- a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah,akan tetapi,*
- b. masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS*
- c. membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik dari tingkat SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh pemerintah Pusat atau pemerintah daerah*
- d. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi pserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan*
- e. membebaskan pungutan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu pad tingkat SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.*

Pihak sekolah pun di tuntutan untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan aturan untuk mencapai tujuan tersebut.”

Senada dengan kepala sekolah, menurut Wakil Kepala Sekolah Dra. Umi Prastiwi , menyampaikan :

“ Program BOS bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah nonpersonalia, meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar dan menengah, mengurangi angka putus sekolah, membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta, memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu, serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah”

Juga dikatakan oleh Rima Maryati, S.Pd selaku Bendaha Bos, beliau mengatakan :

“ tujuan dana BOS untuk membantu biaya operasional sekolah dan membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta, serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah”

Dikatakan oleh Vivi , S.Pd selaku Guru SMP N 7 Brebes, dia mengatakan :

“ tujuan BOS untuk membantu biaya operasional sekolah, membebaskan biaya pendidikan peserta didik (siswa) sehingga dapat mengurangi angka anak putus sekolah “

Menurut Karsono, S.Sos selaku Ketua Komite SMP N 7 Brebes , dia mengatakan :

“ tujuannya untuk membantu operasional sekolah baik untuk keperluan biaya nonpersonalia, dan membebaskan semua biaya pendidikan bagi peserta didik (siswa), sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. Namun demikian kami dari komite masih meminta iuran kepada orang tua siswa, atas kesepakatan bersama dengan orang tua siswa“

Dikatakan juga oleh Illah Krisnawati, S.Pd sebagai Bendahara Komite, beliau menjawab :

“iya mas..... BOS itu untuk membantu operasional sekolah sehingga di harapkan dapat membebaskan semua biaya pendidikan bagi peserta didik (siswa). tapi ya itu mas... sekolah menyampaikan bahwa kalo hanya mengandalkan dai BOS, biaya operasionalnya masih kurang, jadi atas kesepakatan bersama dengan orang tua siswa kami tetap ada iuran tiap bulannya“

Dikatakan oleh Darsinah selaku Wali Murid, beliau mengatakan :

“ katanya sih tujuan BOS untuk menggratiskan biaya sekolah, tapi kenyataannya masih ada iuran – iuran, gimana ini yah mas..... “

Seperti halnya apa yang dikatakan oleh Masduki, selaku orang tua siswa, dia mengatakan :

“ iya mas.....katanya tujuan BOS untuk menggratiskan biaya sekolah anak kami, tapi ko masih ada iuran – iuran, gimana ini yah mas..... “

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan yang hendak dicapai dari program BOS yang diperoleh SMP Negeri 7 Brebes yaitu mengacu pada dasar kebijakan BOS yang telah ditetapkan dalam a) peraturan menteri keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dan BOS dari Kas Umum Negara ke Kas umum Daerah serta pelaporannya. b) Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS dari kas daerah ke sekolah. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian dan BOS dan penggunaan dan BOS di Sekolah. Tujuan BOS pada SMP yang telah dicanangkan oleh pemerintah yaitu untuk :

- a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi,
- b. masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS
- c. membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik yang diselenggarakan oleh pemerintah Pusat atau pemerintah daerah
- d. meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan

- e. membebaskan pungutan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu.
2. Terkait dengan Kejelasan strategi pencapaian tujuan Dana Operasional Sekolah didapat informasi dari informan sebagai berikut:
- a. Bagaimana strategi SMP Negeri 7 Brebes untuk mencapai tujuan dari program bantuan operasional sekolah (BOS).

Di utarakan oleh Bapak Dahudin, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP N 7 Brebes, dia menjawab :

“gini mas.....sesuai aturan, strategi untuk mencapai tujuan dari program bantuan sekolah adalah efektifitas dan efesiensi dalam pengelolaan bantuan BOS biar pengelolaannya berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka kami membentuk tim manajemen BOS sekolah. sebagai penanggungjawab pelaksanaan program BOS ada di saya selaku kepala sekolah, dan memilih anggota bendahara BOS dan satu orang dari unsur orang tua siswa di luar komite sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya. Pengelolaan yang dilaksanakan oleh internal sekolah dalam hal ini kepala sekolah selaku ketua tim manajemen BOS sekolah meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan. Dana BOS yang kami peroleh kami gunakan untuk Pembelian bahan-bahan habis pakai, Membayar langganan daya dan jasa, Membayar biaya perawatan sekolah, Membayar honorarium bulanan guru honorer, Pengembangan profesi guru, Membiayai kegiatan dalam kaitan dengan pengelolaan BOS.”

Menurut Wakil Kepala Sekolah Dra. Umi Prastiwi , menyampaikan :

“ strategi yang diterapkan sekolah yaitu penggunaan dana BOS selalu mengacu pada juklak dan juknis penggunaan Dana BOS,dana BOS digunakan sesuai dengan keperluan yang kebutuhan pihak sekolah dengan mempertimbangkan skala prioritas. Untuk pengelolaan dana BOS sekolah membentuk tim manajemen sekolah yang terdiri dari penanggungjawab pelaksanaan program BOS , anggota bendahara BOS dan satu orang dari unsur orang tua siswa di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah. Pengelolaan yang dilaksanakan oleh internal sekolah meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan.Tim Pengelola Dana BOS harus benar – benar tahu dalam pengelolaannya sehingga selalu mengikuti pelatihan-

pelatihan atau seminar yang dilakukan baik oleh manajemen tingkat kota/kabupaten maupun tingkat propinsi. Dana BOS juga digunakan untuk sarana dan prasarana Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, Pengembangan Perpustakaan, Membiayai kegiatan pembelajaran, Membiayai kegiatan ulangan siswa, Pembelian computer.

Dikatakan juga oleh Rima Maryati, S.Pd selaku Bendahara BOS , dia menjawab :

“ strategi dalam mencapai tujuan BOS di Sekolah SMP Negeri 7 Brebes ya..menggunakan dana BOS sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah, tapi ya itu mas ... soal untuk tbenar – benar menggratiskan biaya sekolah pada siswa itu belum sepenuhnya bisa”

Dikatakan oleh Vivi , S.Pd selaku Guru SMP N 7 Brebes, dia mengatakan :

“ strategi dalam pengelolaan dana BOS di SMP 7 Brebes dalam mencapai tujuan adalah selalu mengikuti petunjuk juklak dan juknis yang berlaku, yaitu juklak dan juknis yang dikeluarkan oleh kemendikbud. Sekolah membentuk tim manajemen BOS yang anggotanya terdiri penanggungjawab, bendahara BOS, komite sekolah dan satu orang dari unsur orang tua siswa. Tim manajemen sekolah harus benar-benar mengerti bagaimana proses pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana BOS yang tepat sasaran sehingga tercapai tujuan.

Ini saya baca ya mas.....Pengelolaan BOS mengikutsertakan dewan guru dan Komite Sekolah. Dalam hal pengelolaan BOS menggunakan MBS, maka SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK harus:

- 1. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;*
- 2. melakukan evaluasi setiap tahun;*
- 3. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:*
 - a. RKAS memuat BOS;*
 - b. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun;*
 - c. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah;*
 - d. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.*

Menurut Karsono, S.Sos selaku Ketua Komite dan Illah Krisnawati, S.Pd sebagai Bendahara Komite SMP N 7 Brebes , mengatakan :

“ strategi dalam pengelolaan dana BOS adalah kami selalu perpegang pada aturan yang berlaku yaitu sesuai juklak dan juknis permendikbud tentang pengelolaan dan BOS, kami bersama Tim Manajemen BOS sekolah menjalankan tugas sesuai dengan kedudukannya. Yang jelas diharapkan dan BOS sesuai dengan maksud dan tujuannya yaitu memberikan bantuan untuk meringankan biaya sekolah siswa dan kemajuan kualitas pendidikan.”

- b. Bagaimana capaian tujuan kebijakan BOS SMP N 7 Brebes dalam setiap semester dan capaian dalam setiap tahun.

Di utarakan oleh Bapak Dahudin, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah mengatakan :

“ Capaian tujuan kebijakan BOS di SMP negeri 7 yaitu dana BOS yang kami peroleh kami kelola sesuai peraturan yang ada, selama ini SMP Negeri 7 Brebes capaiannya cukup bagus, di buktikan setiap tahunnya tidak ada permasalahan...”

Diutarakan juga oleh Dra. Umi Prastiwi selaku Wakil Kepala Sekolah SMP N 7 Brebes, Ia mengatakan :

“ Capaian tujuan kebijakan BOS di SMP negeri 7 cukup bagus mas..... kami dari pihak sekolah menggunakan dana BOS ya sesuai dengan juklak juknis yang ada...capaian dari tujuan dana BOS yang untuk operasional sekolah seperti untuk pengadaan buku pelajaran siswa, membayar honorium guru dan lain-lainnya...”

Menurut Rima Maryati, S.Pd selaku Bendahara BOS, dia mengatakan :

“ Capaiannya cukup bagus mas..... dana BOS digunakan sesuai dengan juklak juknis yang ada...capaian dari tujuan dana BOS yaitu untuk operasional sekolah seperti untuk pengadaan buku pelajaran siswa, membayar honorium guru dan lain-lainnya...”

Dikatakan juga oleh Vivi, S.Pd selaku Guru SMP N 7 Brebes, beliau menjawab :

“ capaian tujuan kebijakan BOS setiap semester dan setiap tahun cukup baik...penggunaan dana BOS sesuai dengan target tujuan dana BOS yang telah di atur pada juklak dan juknis permendagri, sekolah membebaskan biaya sekolah “

Menurut Karsono, S.Sos selaku Ketua Komite dan Illah Krisnawati, S.Pd sebagai Bendahara Komite SMP N 7 Brebes, mengatakan :

“ capaian penggunaan dana BOS setiap semester dan setiap tahun cukup baik....dana BOS digunakan sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam juklak dan juknis permendikbud. Dari seluruh BOS yang diterima oleh sekolah pada semester pertama, sebagian dana digunakan untuk membeli buku teks pelajaran bagi peserta didik dan buku pegangan bagi guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah, capaian penggunaan dana BOS pada setiap tahunnya untuk pembiayaan pengelolaan sekolah, pengadaan alat habis pakai, praktikum pembelajaran, pembelian peralatan computer pembelajaran dll“

Darsinah dan Masduki selaku Wali Murid, mengatakan :

“ kami tidak tahu mas.... Kami hanya ingin dana BOS benar-benar untuk membantu kami meringankan biaya pendidikan anak kami.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Kejelasan strategi pencapaian tujuan Dana Operasional Sekolah SMPN 7 adalah capaian penggunaan dana BOS setiap semester dan setiap tahun cukup baik. Dana BOS digunakan sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam juklak dan juknis permendikbud. Dari seluruh BOS yang diterima oleh SMP Negeri 7 Brebes pada semester pertama, sebagian dana digunakan untuk membeli buku teks pelajaran bagi peserta didik dan buku pegangan

bagi guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah, capaian penggunaan dana BOS pada setiap tahunnya untuk pembiayaan pengelolaan sekolah, pengadaan alat habis pakai, praktikum pembelajaran, pembelian peralatan computer pembelajaran dll.

3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan Dana Operasional Sekolah yang mantap :

a. Apakah ada proses analisis dan perumusan yang dilakukan dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 7 Brebes ?

Di utarakan oleh Bapak Dahudin, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Dra. Umi Prastiwi SMP N 7 Brebes, dia menjawab :

“ ada mas.....SMP negeri 7 Brebes mengadakan analisis dan perumusan terhadap segala kebutuhan operasional sekolah sebelum dana BOS di terima sekolah. analisis dan perumusan pengelolaan dana BOS juga dilakukan dengan mengadakan pertemuan/rapat yang melibatkan orang tua siswa.

Rima Maryati, S.Pd selaku Bendaha Bos dan Vivi , S.Pd selaku Guru SMP N 7 Brebes, menjawab :

“ ya tentu ada mas.....analisis dan perumusan pengelolaan dana BOS sangat penting, untuk menentukan ketercapaian tujuan dana bos yang efektif dan efesien “

Dikatakan juga oleh Karsono, S.Sos selaku Ketua dan Illah Krisnawati, S.Pd sebagai Bendahara Komite SMP N 7 Brebes , mereka mengatakan :

“ ada mas.....analisis dan perumusan pengelolaan dana BOS melalui rapat yang diselenggarakan pihak sekolah bersama seluruh orang tua siswa “

Menurut Darsinah dan Masduki selaku Wali Murid, mereka mengatakan :

“ ya ada mas....kami mengikuti rapat bersama pihak sekolah untuk membahas mengenai dana BOS “

- b. Bagaimana proses analisis dan perumusan yang dilakukan dalam pengelolaan BOS di SMP Negeri 7 Brebes.

Di utarakan oleh Bapak Dahudin, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP N 7 Brebes, dia menjawab :

“ proses analisis dan perumusan yang dilakukan dalam pengelolaan BOS: pertama, dengan melakukan pendataan jumlah peserta didik. Jumlah peserta didik akan menentukan jumlah dana BOS yang diperoleh. Mengidentifikasi seluruh keperluan/kebutuhan belanja sekolah yang diperlukan sesuai dengan penggunaan dana BOS yang diatur dalam juklak dan juknis. Pihak sekolah merencanakan penggunaan dana BOS dengan mengundang seluruh stakeholder, yang diikuti oleh tim BOS sekolah, dewan guru, komite sekolah dan orang tua siswa mengadakan pertemuan untuk mendapatkan kesepakatan penggunaan dana BOS.hasil kesepakatan tersebut di tulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Pihak sekolah memberikan arahan bahwa penggunaan dana bos harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar nasional pendidikan (SNP)

Menurut Wakil Kepala Sekolah Dra. Umi Prastiwi, dia menyampaikan :

“ proses analisis dan perumusan yang dilakukan dalam pengelolaan BOS di SMP Negeri 7 Brebes dilakukan sebelum penerimaan dana BOS, dengan pendataan jumlah peserta didik untuk mengetahui jumlah besaran dana BOS yang nanti akan di terima. Mengidentifikasi seluruh keperluan/kebutuhan belanja sekolah yang diperlukan sesuai dengan penggunaan dana BOS yang diatur dalam juklak dan juknis. Pihak sekolah mengundang seluruh stakeholder, yang diikuti oleh tim BOS sekolah, dewan guru, komite sekolah dan orang tua siswa mengadakan pertemuan untuk mendapatkan kesepakatan penggunaan dana BOS.hasil kesepakatan tersebut di tulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Pihak sekolah memberikan arahan bahwa penggunaan dana bos harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu

mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar nasional pendidikan (SNP)

Menurut Rima Maryati, S.Pd selaku Bendahara BOS dan Vivi, S.Pd selaku Guru SMP N 7 Brebes, menjawab :

“ analisis pengelolaan dana bos di dasarkan pada identifikasi seluruh kebutuhan operasional sekolah yang diperlukan, perumusan pengelolaan dilaksanakan dengan diawali dengan perencanaan penggunaan dana BOS. Perencanaan dilakukan dengan mengadakan musyawarah yang melibatkan tim BOS sekolah, dewan guru, komite sekolah dan orang tua siswa untuk membahas dan menetapkan belanja sekolah dan kegiatan-kegiatan sekolah yang menggunakan dana BOS”

Juga dikatakan oleh Karsono, S.Sos selaku Ketua dan Illah Krisnawati, S.Pd sebagai Bendahara Komite SMP N 7 Brebes, mengatakan :

“ kami melakukan analisis dan perumusan bersama dengan pihak sekolah dengan mengadakan musyawarah bersama dengan kepala sekolah, dewan guru serta orang tua siswa. untuk membahas segala keperluan dan kebutuhan operasional sekolah...perumusan dilaksanakan dari perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban”

Menurut Darsinah dan Masduki selaku Wali Murid, mengatakan :

“kami dilibatkan dalam musyawarah dana BOS bersama kepala sekolah, dewan guru, komite dan orang tua murid lainnya...dalam rapat membahas pengelolaan dana BOS, ya...harapan kami dalam perumusan pengelolaan dana BOS benar-benar digunakan untuk membebaskan seluruh biaya sekolah anak-anak kami..”

- c. Bagaimana hasil perumusan kebijakan dana BOS yang diambil SMP Negeri 7 Brebes untuk mencapai sasaran ?

Di utarakan oleh Bapak Dahudin, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah dan Dra. Umi Prastiwi selaku Wakil Kepala Sekolah SMP N 7, mengatakan :

“ hasil perumusannya sesuai dengan apa-apa yang telah diatur dalam juklak dan juknis pengelolaan dana BOS yaitu sesuai dengan yang ada

pada permendagri tentang pengelolaan dana BOS yaitu : tentang aturan penggunaan dana BOS yang diperbolehkan dan penggunaan dana BOS yang tidak diperbolehkan. Intinya perumusan dana BOS sesuai dengan tujuan dana BOS itu sendiri yaitu membebaskan segala pungutan biaya apapun kepada peserta didik bagi orang tua yang tidak mampu “

Menurut Rima Maryati, S.Pd selaku Bendaha Bos dan Vivi , S.Pd selaku Guru SMP N 7 Brebes, menjawab :

“ hasil perumusan dari kebijakan dana BOS yaitu mengenai belanja operasional sekolah, perencanaan kegiatan-kegiatan sekolah. kesemuanya mengacu pada permendagri tentang pedoman pengelolaan dana BOS yang berlaku yaitu tentang perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS”

Karsono, S.Sos selaku Ketua dan Illah Krisnawati, S.Pd sebagai Bendahara Komite SMP N 7 Brebes , mengatakan :

“ hasil perumusannya yaitu mengenai perencanaan, penggunaan dan pelaporan dana bos untuk satu tahun ajaran. Dari pengalokasian dana BOS, pembelanjaan operasional sekolah yang telah ditetapkan “

Menurut Darsinah dan Masduki selaku Wali Murid, mengatakan :

“ hasil dari pembahasan dana BOS bersama sekolah dan komite yaitu penggunaan dan bos untuk kegiatan operasional sekolah....”

Dari hasil wawancara dengan informan terkait dengan Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan Dana Operasional Sekolah yang mantap dapat disimpulkan bahwa proses analisis dan perumusan yang dilakukan dalam pengelolaan BOS di SMP Negeri 7 Brebes dilakukan sebelum penerimaan dana BOS, dengan pendataan jumlah peserta didik untuk mengetahui jumlah besaran dana BOS yang nanti akan di terima. Mengidentifikasi seluruh keperluan/kebutuhan belanja sekolah yang diperlukan sesuai dengan penggunaan

dana BOS yang diatur dalam juklak dan juknis. Pihak sekolah mengundang seluruh stakeholder, yang diikuti oleh tim BOS sekolah, dewan guru, komite sekolah dan orang tua siswa mengadakan pertemuan untuk mendapatkan kesepakatan penggunaan dana BOS. Hasil kesepakatan tersebut di tulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Pihak sekolah memberikan arahan bahwa penggunaan dana bos harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar nasional pendidikan (SNP).

4. Terkait dengan Perencanaan yang matang dalam pengelolaan Dana Operasional Sekolah :

a. Bagaimana rencana kerja menengah (RKJM) dalam pengelolaan BOS yang dilakukan SMP Negeri 7 Brebes ?

Di utarakan oleh Bapak Dahudin, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah dan Dra. Umi Prastiwi selaku Wakil Kepala Sekolah SMP N 7 Brebes, mengatakan :

“ untuk menyusun Rencana kerja menengah (RKJM) sekolah kami lakukan dengan selalu mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder, baik tim MBS, guru, dan komite....kami melibatkan peran dari orang tua siswa/wali murid dan dewan sekolah untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan mutu sekolah. kami juga melaporkan kondisi kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, jumlah dan klasifikasi pendidik dan kependidikan dan pengembangannya, kondisi sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan. Kami paparkan budaya dan lingkungan sekolah serta kemitraan dan peran masyarakat sekitar. RKJM disusun untuk pengembangan potensi selama kurun waktu 4 tahun yang berisi standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana

dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, penilaian dan standar pendidik dan tenaga pendidikan... “

Disampaikan oleh Rima Maryati, S.Pd selaku Bendaha BOS dan Vivi , S.Pd selaku Guru SMP N 7 Brebes, mereka menjawab :

“ penggunaan dana BOS di sesuaikan dengan rencana kerja menengah yang telah disusun, seperti dalam pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler kesiswaan, termasuk pembiayaan penerimaan siswa baru, honorium pendidik non PNS, pengembangan perpustakaan, pembiayaan evaluasi pembelajaran, pembiayaan pengelolaan sekolah seperti pembelian atk, dll, Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pembayaran Honor, Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran dan biaya lainnya ”

Menurut Karsono, S.Sos selaku Ketua Komite dan Illah Krisnawati, S.Pd sebagai Bendahara Komite SMP N 7 Brebes , mengatakan :

“ RKJM disusun untuk pengembangan potensi selama kurun waktu 4 tahun yang berisi standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, penilaian dan standar pendidik dan tenaga pendidikan... penggunaan dana BOS di sesuaikan dengan rencana kerja menengah yang telah disusun, seperti dalam pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler kesiswaan, termasuk pembiayaan penerimaan siswa baru, honorium pendidik non PNS, pengembangan perpustakaan, pembiayaan evaluasi pembelajaran, pembiayaan pengelolaan sekolah seperti pembelian atk, dll, Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pembayaran Honor, Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran dan biaya lainnya

- b. Bagaimana rencana kerja tahunan (RKT) dalam pengelolaan BOS yang dilakukan SMP Negeri 7 Brebes ?

Di utarakan oleh Bapak Dahudin, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP N 7 Brebes, dia menjawab :

“ Rencana Kerja Tahunan (RKT) pengelola BOS

1. *Membantu sekolah dalam membelanjakan anggaran secara bijaksana untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam satu tahun.*
2. *Membantu sekolah dalam merespon tuntutan partisipasi masyarakat, dan Membantu sekolah dalam meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas “*

Tahapan RKT adalah persiapan yang kami lakukan adalah membentuk kelompok kerja rencana kerja sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wakil dari guru, wakil dari TU, wakil dari komite sekolah. kemudian kami lakukan tahap perumusan yaitu identifikasi tantangan, analisis pemecahan tantangan, penyusunan program, dan penyusunan rencana biaya dan pendanaan. dan tahap pengesahan RKT. Setelah tahapan RKT selesai di sahkan selanjutnya kami mensosialisasikan kepada para pemangku kepentingan di sekolah dengan menempel RKT dan menginformasikan pada acara rapat/musyawarah.

Menurut Wakil Kepala Sekolah Dra. Umi Prastiwi, menyampaikan :

“ penggunaan Dana BOS di sesuaikan dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sekolah yang telah ditetapkan melalui kesepakatan bersama dengan semua pihak. RKT itu kan sangat penting mas...RKT digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan sekolah selama satu tahun. Penggunaan dana BOS dalam satu tahun di belanjakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan pengelolaan sekolah yang telah di atur dalam juklak dan juknis.”

Juga dikatakan oleh Rima Maryati, S.Pd selaku Bendaha BOS dan Vivi , S.Pd selaku Guru SMP N 7 Brebes, menjawab :

“ penggunaan dana BOS disesuaikan dengan RKT yang telah disepakati bersama, dan juga sesuai dengan juklak dan juknis pengelolaan dana BOS”

Menurut Karsono, S.Sos selaku Ketua Komite dan Illah Krisnawati, S.Pd sebagai Bendahara Komite SMP N 7 Brebes , mengatakan :

“ Tahapan RKT adalah persiapan dengan membentuk kelompok kerja rencana kerja sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wakil dari guru, wakil dari TU, wakil dari komite sekolah. kemudian dilakukan tahap perumusan yaitu identifikasi tantangan,

analisis pemecahan tantangan, penyusunan program, dan penyusunan rencana biaya dan pendanaan. dan tahap pengesahan RKT. Setelah tahapan RKT selesai di sahkan selanjutnya kami mensosialisasikan kepada para pemangku kepentingan di sekolah dengan menempel RKT dan menginformasikan pada acara rapat/musyawarah. penggunaan dana BOS disesuaikan dengan RKT yang telah disepakati bersama, dan juga sesuai dengan juklak dan juknis pengelolaan dana BOS”

- c. Bagaimana rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dalam pengelolaan BOS yang dilakukan SMP Negeri 7 Brebes ?

Di utarakan oleh Bapak Dahudin, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah dan Dra. Umi Prastiwi selaku Wakil Kepala Sekolah SMP N 7 Brebes, dia mengatakan :

“ RKAS dalam pengelolaan BOS di gunakan untuk 8 standar pengembangan sekolah :

- *Standar kompetensi sekolah*
- *Standar isi*
- *Standar proses*
- *Standar pendidik dan tenaga kependidikan*
- *Standar sarana dan prasarana*
- *Standar pengelolaan*
- *Standar pembiayaan*
- *Standar penilaian*

penggunaan dana BOS di sesuaikan dengan rencana kerja Anggaran Sekolah, seperti dalam pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler kesiswaan, termasuk pembiayaan penerimaan siswa baru, honorium pendidik non PNS, pengembangan perpustakaan, pembiayaan evaluasi pembelajaran, pembiayaan pengelolaan sekolah seperti pembelian atk, dll, Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pembayaran Honor, Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran dan biaya lainnya”

Menurut Rima Maryati, S.Pd selaku Bendaha BOS dan Vivi , S.Pd selaku Guru SMP N 7 Brebes, menjawab :

“rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dalam pengelolaan BOS yang dilakukan SMP Negeri 7 Brebes banyak sekali mas..... Peningkatan rerata NUN, Peningkatan prestasi bidang akademik, Peningkatan prestasi bidang nonakademik, penyusunan kurikulum yang bermuatan ketrampilan , penyusunan dan pengembangan silabus untuk semua mapel, penyusunan dan pengembangan RPP yang inovatif dan kolaboratif untuk semua mapel, Proses Belajar Mengajar dengan menggunakan media yang inovatif, Pelayanan Bimbingan dan konseling, Penggunaan IT oleh siswa dan tenaga pendidik dan kependidikan yang edukatif dan bijak sesuai dengan aturan dan norma yang ada, Peningkatan Kompetensi Pendidik, Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan, pemenuhan ruang belajar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas pembelajaran sesuai rombel dan standar sarana dan prasarana pendidikan, pemenuhan dalam pemeliharaan sarana dan prasana pendidikan, Pengembangan Manajemen sekolah, Peningkatan Hubungan masyarakat, Peningkatan sumber dana, Penggunaan dana yang proporsional, transparan dan akuntabel, Pelaporan penggunaan dana, Persiapan dan Pelaksanaan Penilaian, Tindak Lanjut Hasil Penilaian, Pelaporan hasil belajar”

Disampaikan oleh Karsono, S.Sos selaku Ketua Komite Illah Krisnawati, S.Pd sebagai Bendahara Komite SMP N 7 Brebes , mengatakan :

“ rencana kegiatan dan anggaran sekolah dilaksanakan sesuai pengelolaan sekolah pada umumnya, seperti kegiatan belajar mengajar, kegiatan pengadministrasian, kegiatan ekstrakurikuler, pelaksanaan UN, peningkatan kompetensi guru...yang kesemuanya tertuang dalam delapan standar RKAS penggunaan Dana BOS “

Dari hasil wawancara terhadap informan terkait dengan Perencanaan yang matang dalam pengelolaan Dana Operasional Sekolah dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan dana BOS dengan menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKJM, RKT, dan RKAS memintakan persetujuan dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite

Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Rencana kerja menengah (RKJM) sekolah dilakukan dengan selalu mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder, baik tim MBS, guru, dan komite dengan melibatkan peran dari orang tua siswa/wali murid dan dewan sekolah untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan mutu sekolah. Melaporkan kondisi kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, jumlah dan klasifikasi pendidik dan kependidikan dan pengembangannya, kondisi sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan. Pemaparan budaya dan lingkungan sekolah serta kemitraan dan peran masyarakat sekitar. RKJM disusun untuk pengembangan potensi selama kurun waktu 4 tahun yang berisi standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, penilaian dan standar pendidik dan tenaga pendidikan.

Rencana kerja menengah yang telah disusun, seperti dalam pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler kesiswaan, termasuk pembiayaan penerimaan siswa baru, honorium pendidik non PNS, pengembangan perpustakaan, pembiayaan evaluasi pembelajaran, pembiayaan pengelolaan sekolah seperti pembelian ATK, dll, Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah, Lngganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pembayaran Honor, Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran dan biaya lainnya.

Tahapan pertama RKT adalah persiapan dengan membentuk kelompok kerja rencana kerja sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah,

wakil dari guru, wakil dari TU, wakil dari komite sekolah. kemudian kami lakukan tahap perumusan yaitu identifikasi tantangan, analisis pemecahan tantangan, penyusunan program, dan penyusunan rencana biaya dan pendanaan. dan tahap pengesahan RKT. Setelah tahapan RKT selesai di sahkan selanjutnya kami mensosialisasikan kepada para pemangku kepentingan di sekolah dengan menempel RKT dan menginformasikan pada acara rapat/musyawarah.

Penggunaan dana BOS di sesuaikan dengan rencana kerja Anggaran Sekolah (RKAS), seperti dalam pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler kesiswaan, termasuk pembiayaan penerimaan siswa baru, honorium pendidik non PNS, pengembangan perpustakaan, pembiayaan evaluasi pembelajaran, pembiayaan pengelolaan sekolah seperti pembelian atk, dll, Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pembayaran Honor, Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran dan biaya lainnya.

5. Terkait Penyusunan program Dana Bantuan Operasional Sekolah yang tepat :

a. Bagaimana kegiatan penyusunan Program penggunaan dana BOS SMP N

7 Brebes ?

Di utarakan oleh Bapak Dahudin, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP N

7 Brebes, dia menjawab :

“ Kegiatan penyusunan program penggunaan dana BOS : pihak sekolah melakukan pedataan peserta didik, mengadakan musyawarah bersama kepala sekolah, dewan guru, komite sekolah dan wakil orang tua siswa untuk membentuk tim BOS, menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah

(RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), pembelanjaan dana BOS sesuai dengan rencana yang telah disahkan, dan kegiatan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban “

Menurut Wakil Kepala Sekolah Dra. Umi Prastiwi dan Rima Maryati, S.Pd selaku Bendaha BOS, mereka menyampaikan :

“Penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP). Penggunaan BOS diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah...

Dikatakan oleh Vivi , S.Pd selaku Guru SMP N 7 Brebes, mengatakan :

“ kegiatan penyusunan Program penggunaan dana BOS SMP N 7 Brebes melalui tahapan mas....dari sebelumnya dilakukan pendataan dapodik yang dilaporkan ke kabupaten, pembentukan tim BOS Sekolah, kegiatan penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), pembelanjaan dana BOS sesuai dengan rencana yang telah disahkan, dan kegiatan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban “

Menurut Karsono, S.Sos selaku Ketua Komite dan Illah Krisnawati, S.Pd sebagai Bendahara Komite SMP N 7 Brebes , mengatakan :

“ Rencana kegiatan sekolah yang didanai BOS banyak mas....., sebelumnya dilasanakan musyawarah bersama dengan pihak sekolah, komite dan wakil orang tua siswa membentuk tim BOS Sekolah, membahas rencana kerja dan rencana kegiatan sekolah dari dana BOS tersebut. Kami diberi kesempatan untuk mengajukan pandangan atau usulan-usulan “

b. Apa saja realisasi program kebijakan dana BOS SMP N 7 Brebes ?

Di utarakan oleh Bapak Dahudin, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Dra. Umi Prastiw SMP N 7 Brebes, dia menjawab :

“ Realisasi program kebijakan dana BOS di SMP N 7 adalah :

- 1. Pengembangan perpustakaan*
- 2. PPDB*
- 3. Kegiatan pembelajaran dan Ekstrakurikuler*
- 4. Kegiatan evaluasi pembelajaran*
- 5. Pengelolaan sekolah*
- 6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah*
- 7. Langganan daya dan jasa*
- 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah*
- 9. Pembayaran honor*
- 10. Pembelian/perwatan alat multi media pembelajaran
Biaya lainnya.”*

Dikatakan oleh Rima Maryati, S.Pd selaku Bendaha BOS dan Vivi , S.Pd selaku Guru SMP N 7 Brebes, menjawab :

“ dana BOS yang kami peroleh kami gunakan untuk :

- 1. Pengembangan perpustakaan*
- 2. PPDB*
- 3. Kegiatan pembelajaran dan Ekstrakurikuler*
- 4. Kegiatan evaluasi pembelajaran*
- 5. Pengelolaan sekolah*
- 6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah*
- 7. Langganan daya dan jasa*
- 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah*
- 9. Pembayaran honor*
- 10. Pembelian/perwatan alat multi media pembelajaran*
- 11. Biaya lainnya.”*

Dikatakan oleh Vivi , S.Pd selaku Guru SMP N 7 Brebes, dia mengatakan :

“ realisasi penggunaan dana BOS di belanjakan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti Pengembangan Perpustakaan, Penerimaan

Peserta Didik Baru, Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, Kegiatan Evaluasi Pembelajaran, Pengelolaan Sekolah, Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pembayaran Honor, Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran, Biaya Lainnya”

Disampaikan oleh Karsono, S.Sos selaku Ketua Komite dan Illah Krisnawati,

S.Pd sebagai Bendahara Komite SMP N 7 Brebes , mengatakan :

“ penggunaan dana BOS di gunakan untuk keperluan semua kegiatan sekolah : Pengembangan Perpustakaan, Penerimaan Peserta Didik Baru, Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, Kegiatan Evaluasi Pembelajaran, Pengelolaan Sekolah, Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pembayaran Honor, Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran, Biaya Lainnya”

Menurut Darsinah dan Masduki selaku Wali Murid, mengatakan :

“ realisasi dana BOS di SMP N 7 untuk keperluan sekolah, semua di belanjakan sesuai peraturan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, termasuk untuk menggratiskan biaya sekolah anak-anak kami”

Dari hasil wawancara terhadap informan terkait Penyusunan program Dana Bantuan Operasional Sekolah yang tepat dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyusunan Program penggunaan dana BOS SMP N 7 Brebes melalui tahapan yaitu dilakukan pendataan dapodik yang dilaporkan ke kabupaten, pembentukan tim BOS Sekolah, kegiatan penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), pembelanjaan dana BOS sesuai dengan rencana yang telah disahkan, dan kegiatan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Adapun realisasi penggunaan dana BOS di belanjakan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti Pengembangan Perpustakaan, Penerimaan Peserta Didik Baru, Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, Kegiatan Evaluasi Pembelajaran, Pengelolaan Sekolah, Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah, Lngganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pembayaran Honor, Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran, Biaya lainnya.

6. Pertanyaan terkait dengan tersedianya sarana dan prasarana dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah :
- a. Bagaimana Sumber daya manusia pengelola Bantuan Operasional Sekolah di SMP N 7 Brebes ?

Di utarakan oleh Bapak Dahudin, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP N 7 Brebes, dia menjawab :

“ dana BOS di kelola oleh tim BOS Sekolah yang anggotanya terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara BOS, satu orang dari unsur orang tua, komite sekolah dan penanggungjawab pendataan. Sarana dan Prasarana penunjang dalam pengelolaan dana BOS, sarana penunjang pengelolaan dana BOS sementara ini tidak ada tempat/ruangan khusus, kami masih menggunakan ruangan di sekolah, untuk keperluan lainnya seperti atk dll kami tersedia dengan dengan menggunakan dana BOS”

Menurut Wakil Kepala Sekolah Dra. Umi Prastiwi, menyampaikan :

“ SDM pengelola dana BOS dari unsur sekolah dan orang Tua siswa , yaitu kepala sekolah, bendahara BOS dari guru, satu perwakilan orang tua siswa, dan komite sekolah. untuk sarana dan prasarana menggunakan sarana milik sekolah “

Menurut Rima Maryati, S.Pd selaku Bendaha Bos dan Vivi , S.Pd selaku Guru SMP N 7 Brebes, menjawab :

“ pengelola dana BOS SMP N 7 adalah Tim BOS yang telah dibentuk bersama pihak orang tua siswa...yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara BOS dari guru, satu perwakilan orang tua siswa, dan komite sekolah. untuk sarana dan prasarana menggunakan sarana milik sekolah “

Dikatakan oleh Karsono, S.Sos selaku Ketua Komite dan Illah Krisnawati, S.Pd sebagai Bendahara Komite SMP N 7 Brebes , mengatakan :

“ ya mas....pengelola dana BOS SMP N 7 adalah Tim BOS yang telah dibentuk bersama pihak orang tua siswa...yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara BOS dari guru, satu perwakilan orang tua siswa, dan komite sekolah. untuk sarana dan prasarana menggunakan sarana milik sekolah “

Menurut Darsinah dan Masduki selaku Wali Murid, mengatakan :

“ tim BOS Sekolah mas....sarannya menggunakan sarana sekolah “

b. Sarana dan prasarana penunjang apa saja yang digunakan dalam pengelolaan dana BOS di SMP N 7 Brebes ?

Di utarakan oleh Bapak Dahudin, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP N 7 dan Wakil Kepala Sekolah Dra. Umi Prastiwi , menyampaikan :

“ sarana penunjang berupa ruangan yang masih menggunakan ruangan milik sekolah, seperangkat computer, dan ATK “

Menurut Rima Maryati, S.Pd selaku Bendaha BOS dan Vivi , S.Pd selaku Guru SMP N 7, menjawab :

“ ruangan dan seperangkat computer yang terkoneksi dengan internet serta ATK “

Menurut Karsono, S.Sos selaku Ketua Komite dan Illah Krisnawati, S.Pd sebagai Bendahara Komite SMP N 7 Brebes , mengatakan :

“ ruangan dan seperangkat computer yang terkoneksi dengan internet serta ATK “

Dari hasil wawancara dengan informan terkait dengan tersedianya sarana dan prasarana dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah dapat disimpulkan bahwa dana BOS di kelola oleh tim BOS Sekolah yang anggotanya terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara BOS, satu orang dari unsur orang tua, komite sekolah dan penanggungjawab pendataan. Sarana dan Prasarana penunjang dalam pengelolaan dana BOS masih menggunakan ruangan di sekolah, untuk keperluan lainya seperti atk dll kami tersedia dengan dengan menggunakan dana BOS.

7. Terkait Sistem pengawasan dan pengendalian Bantuan Operasional Sekolah yang bersifat mendidik :

a. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan dana BOS di SMP N 7 Brebes ?

Di utarakan oleh Bapak Dahudin, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP N 7 dan Wakil Kepala Sekolah Dra. Umi Prastiwi Brebes, mengutarakan :

“ Pengawasan Dana BOS terdiri dari dari pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : Pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing masing instansi kepada bawahannya baik tingkat pusat, propinsi, Kabupaten / Kota maupun di sekolah. prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/Kota kepada sekolah .

1. *Pengawasan fungsional internal oleh inspektorat (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan serta inspektorat daerah propinsi dan kabupaten/Kota dengan melakukan audit sesuai dengan*

- kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan di audit, dan sesuai dengan wilayah kewenangannya masing-masing.*
2. *Pengawasan oleh badan pengawas keuangan dan pembnagunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.*
 3. *Pmeriksaan oleh badan pemeriksa keungan (BPK) sesuai dengan kewenangannya.*
 4. *Pengawasan masyarakat dalam rangka transparasi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat dan unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, kabupaten.kota, propinsi dan pusat mengacu pada kaidah keterbukaan informasi public, yaitu semua dokumen BOS dapat di akses oleh public kecuali dirahasiakan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS agar segera dilaporan kepada instansi pengawas fungsioanal atau lembaga berwenang lainnya.”*

Menurut Rima Maryati, S.Pd selaku Bendaha BOS dan Vivi , S.Pd selaku Guru SMP N 7 Brebes, menjawab :

“ pengawasan dana BOS yaitu :

1. *Pengawasan fungsional internal oleh inspektorat (Itjen) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan serta inspektorat daerah propinsi dan kabupaten/Kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan di audit, dan sesuai dengan wilayah kewenangannya masing-masing.*
2. *Pengawasan oleh badan pengawas keuangan dan pembnagunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.*
3. *Pmeriksaan oleh badan pemeriksa keungan (BPK) sesuai dengan kewenangannya.*
4. *Pengawasan masyarakat dalam rangka transparasi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat dan unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, kabupaten.kota, propinsi dan pusat mengacu pada kaidah keterbukaan informasi public, yaitu semua dokumen BOS dapat di akses oleh public kecuali dirahasiakan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS agar segera dilaporan kepada instansi pengawas fungsioanal atau lembaga berwenang lainnya.”*

- b. Bagaimana pelaporan penggunaan dana BOS yang dilakukan di SMP N 7 Brebes ?

Di utarakan oleh Bapak Dahudin, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Dra. Umi Prastiwi SMP N 7 Brebes, dia menjawab :

“ Pelaporan penggunaan dana BOS yang dilakukan : dilaporkan secara off line dan secara on line. Yang dilaporkan adalah :

1. *Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana Laporan disusun berdasarkan BKU dari semua sumber dana yang dikelola sekolah pada periode yang sama. Laporan ini dibuat setiap semester dan ditandatangani oleh Bendahara, kepala sekolah, dan Komite Sekolah. Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS. Bukti pengeluaran yang sah disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. Dokumen ini harus disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (pendidikan menengah dan pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan. “*
2. *Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS. Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh belanja/penggunaan dana yang bersumber dari BOS yang diterima sekolah pada tahun berkenaan. Sisa BOS tahun sebelumnya tidak dilaporkan pada laporan BOS tahun ini, akan tetapi tetap tercatat sebagai penerimaan sekolah dari sumber lain dan tetap tercatat penggunaannya pada pembukuan anggaran sekolah.*
3. *Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat*
4. *Laporan Aset. Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, setiap sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah yang menerima BOS wajib melaporkan seluruh belanja yang telah dilakukan, termasuk hasil pembelian barang yang menjadi aset pemerintah daerah. Hasil pembelian barang yang dilaporkan merupakan pembelian barang yang dilakukan oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari BOS yang diterima pada tahun berkenaan.*

Dikatakan oleh Rima Maryati, S.Pd selaku Bendaha BOS dan Vivi , S.Pd selaku Guru dan SMP N 7 Brebes, menjawab :

“ pelaporan penggunaan dana BOS dilakukan secara off line dan On line “

Menurut Karsono, S.Sos selaku Ketua Komite dan Illah Krisnawati, S.Pd sebagai Bendahara Komite SMP N 7 Brebes , mengatakan :

“ pelaporan penggunaan dana BOS dilakukan melalui secara off line dan On line “

Dari hasil wawancara terhadap informan terkait Sistem pengawasan dan pengendalian Bantuan Operasional Sekolah yang bersifat mendidik dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dana BOS terdiri dari dari pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : Pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing masing instansi kepada bawahannya baik tingkat pusat, propinsi, Kabupaten / Kota maupun di sekolah. prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/Kota kepada sekolah .

1. Pengawasan fungsional internal oleh inspektorat (Itjen) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan serta inspektorat daerah propinsi dan kabupaten/Kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan di audit, dan sesuai dengan wilayah kewenangannya masing-masing.

2. Pengawasan oleh badan pengawas keuangan dan pembnagunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.
3. Pemeriksaan oleh badan pemeriksa keungan (BPK) sesuai dengan kewenangannya.
4. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparasi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat dan unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, kabupaten.kota, propinsi dan pusat mengacu pada kaidah keterbukaan informasi public, yaitu semua dokumen BOS dapat di akses oleh public kecuali dirahasiakan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsioanal atau lembaga berwenang lainnya.

V.1.2. Kendala Efektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dalam pelaksanaan Efektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 7 Brebes, ditemukan beberapa kendala Efektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 7 Brebes, yang mana faktor-faktor tersebut terdiri dari :

1. Sosialisasi

Segala sesuatu agar dapat berjalan secara efektif atau mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, faktor sosialisasi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Karena tanpa adanya sosialisasi yang baik dan maksimal orang tidak akan mengetahui tujuan yang akan kita capai sehingga efektivitas tersebut tidak akan tercapai

dengan baik. Sosialisasi yang kurang maksimal dapat dikatakan salah satu kendala efektifnya penggunaan BOS. Dengan sosialisasi akan dihasilkan pengelolaan dana BOS yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di utarakan oleh Bapak Dahudin, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP N 7 Brebes mengenai kendala dalam pelaksanaan efektivitas kebijakan BOS, dia mengatakan :

“ sosialisasi penerapan dana BOS sangat dibutuhkan mas..., kalo kurangnya sosialisasi kami kesulitan untuk melaksanakannya dengan baik, kan biar kita tahu dengan jelas bagaimana penerapan. tim BOS dari Kabupaten/Kota atau dari provinsi harusnya sering melaksanakan kegiatan bintek atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pelaksanaan program BOS. “

2. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi, dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya tidak akan menghasilkan tujuan yang telah digariskan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi itu sendiri maupun bagi para pengelolanya. Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang

diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan.

Seperti halnya di sampaikan oleh Dra. Umi Prastiwi selaku Wakil Kepala Sekolah mengatakan :

“ sangat diperlukan pengawasan yang ketat mas....baik dari internal sekolah yaitu fungsi komite haus bisa jalan, dan juga dari inspektorat atau yang berwenang lainnya harus terjun mengawasi dana BOS. kurangnya pengawasan penggunaan dana BOS, menjadi potensi untuk terjadinya penyelewengan dan nanti tidak tepat sasaran ...”

3. Minimnya Dana BOS

Minimnya dana BOS yang diperoleh oleh sekolah, mengakibatkan sulitnya sekolah untuk mencapai tujuan kebijakan dana BOS itu sendiri yaitu untuk membebaskan siswa dari segala pungutan biaya apapun. Sekolah kekurangan dana untuk operasional sekolah dalam satu tahun, sehingga sekolah melalui komite masih meminta sumbangan sukarela kepada orang tua/wali siswa.

Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Dahudin, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP N 7 Brebes mengenai kendala dalam pelaksanaan efektivitas kebijakan BOS, dia mengatakan :

“ kami kekurangan dana operasional sekolah, kalo hanya mengandalkan dari dana BOS untuk membiayai kegiatan yang sangat banyak saya rasa kurang.... Perlu ada penambahan dana mas. “

V.1.3. Solusi mengatasi Kendala Efektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Solusi merupakan jalan keluar atau jawaban untuk mengatasi masalah yang ada. Dari kendala yang ada dalam mewujudkan dana BOS yang efektif diperlukan langkah kongkrit yang dari semua pihak. Solusi dalam mengatasi kendala efektivitas kebijakan dana BOS, seperti yang dikatakan oleh Bapak Dahudin, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP N 7 Brebes, beliau mengatakan :

“ untuk mengatasi kendala yang ada mencapai pelaksanaan dan BOS yang efektif saya rasa perlu diadakan pelatihan-pelatihan dalam bentuk bintek pengelolaan dana BOS sehingga pihak sekolah benar-benar tahu cara penggunaan dana BOS, juga di perlukan pengawasan yang ketat oleh pihak berwenang mas... untuk menghindari tindak penyelewengan dana BOS, selain itu juga perlu ada penambahan besaran dana BOS , biar biaya operasional sekolah tercukupi sehingga tidak ada lagi penarikan iuran/sumbangan dari peserta didik “

V. 2. Pembahasan

V.2.1. Efektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 7 Brebes

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya oprasional nonoprasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, yang secara umum bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Sehingga efektifitas yang merupakan kondisi dinamis serangkaian

proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan program BOS yang telah ditetapkan bagi sekolah penerima sangat ditekankan, sehingga tujuan dan harapannya yang akan tercapai.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah.
- b. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuka apapun, di sekolah negeri maupun swasta, dan
- c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka Pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal nasional dan global sehingga lahirnya kebijakan dana BOS tersebut.

Program Dana BOS diberikan kepada sekolah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) yaitu, dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan

dewan guru dan komite sekolah. Jadi pada dasarnya MBS secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan disekolah. Dana BOS tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk intervensi tidak boleh dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Walikota, Bupati, Gubernur dan OPD terkait. Dana BOS hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan pada sekolah.

Dana BOS yang diperoleh tiap sekolah begitu besar, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. BOS harus menjadi sarana penting peningkatan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu, dan manajemen sekolah.
- c. Sekolah harus memiliki rencana jangka menengah yang disusun untuk periode empat tahunan
- d. Sekolah harus menyusun rencana kerja tahunan (RKT). Dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Dana BOS merupakan bagian integral didalam RKAS tersebut.
- e. Rencana jangka menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan

disahkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta)

Penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, yang harus didaftarkan sebagai salah satu sumber penerimaan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS/RAPBS) disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau mengganti yang telah rusak. Agar setiap sekolah dapat menggunakan dana BOS sesuai ketentuan penggunaan dana dan untuk mengukur seberapa besar ketepatan penggunaan dana BOS pada setiap sekolah, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan ketentuan penggunaan dana BOS untuk setiap sekolah yang menerima dana BOS yang terdiri dari beberapa poin.

1. Strategi Pencapaian Tujuan

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai dari program BOS yang diperoleh SMP Negeri 7 Brebes yaitu mengacu pada dasar kebijakan BOS yang telah ditetapkan dalam a) peraturan menteri keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dan BOS dari Kas Umum Negara ke Kas umum Daerah serta pelaporannya. b) Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS dari kas daerah ke sekolah. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme

pengalokasian dan BOS dan penggunaan dan BOS di Sekolah. Tujuan BOS pada SMP yang telah dicanangkan oleh pemerintah yaitu untuk :

- a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi,
- b. masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS
- c. membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik yang diselenggarakan oleh pemerintah Pusat atau pemerintah daerah
- d. meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan
- e. membebaskan pungutan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu.

Kejelasan strategi pencapaian tujuan Dana Operasional Sekolah SMPN 7 adalah capaian penggunaan dana BOS setiap semester dan setiap tahun. Dana BOS digunakan sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam juklak dan juknis permendikbud. Dari seluruh BOS yang diterima oleh SMP Negeri 7 Brebes pada semester pertama, sebagian dana digunakan untuk membeli buku teks pelajaran bagi peserta didik dan buku pegangan bagi guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah, capaian penggunaan dana BOS pada setiap tahunnya untuk pembiayaan pengelolaan sekolah, pengadaan alat habis pakai, praktikum pembelajaran, pembelian peralatan computer pembelajaran dll.

- a. Pembelian bahan-bahan habis pakai

Bahan-bahan habis pakai yang dibeli adalah bahan habis pakai pendukung proses belajar mengajar seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris. Dana BOS dapat juga digunakan untuk membayar langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor dan alat-alat kebersihan.

b. Membayar langganan daya dan jasa

Langganan daya dan jasa yang dibayar adalah langganan listrik, air, dan telepon, internet (fixed/mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar, pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru (penggunaan internet dengan mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp. 250.000/bulan). Membeli genset atau jenis lainnya yang cocok dengan daerah tertentu misalnya panel surya, jika di sekolah tidak ada jaringan listrik.

c. Membayar biaya perawatan sekolah

Perawatan sekolah yang dibiayai oleh dana BOS adalah biaya perawatan ringan seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeleur, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas lainnya.

Dari data yang peneliti lihat dari rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SMPN 7 Brebes bentuk-bentuk kegiatan perawatan sekolah yang akan dibiayai oleh dana BOS adalah : biaya perbaikan dan

perawatan fasilitas sekolah ringan seperti pengecatan, perbaikan jendela, atap bocor, memperbaiki mushala dan berbagai perawatan ringan sekolah lainnya..

d. Membayar honorarium bulanan guru honorer

Dalam membuat perencanaan anggaran dana BOS untuk membayar tenaga kerja honorer tetap dilakukan didalam rapat penyusunan RKAS dengan mendaftarkan jumlah tenaga honorer. Adapun ketentuan Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM), pegawai administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satpam, pegawai kebersihan. Dalam pengangkatan guru/tenaga kependidikan honorer sekolah harus mempertimbangkan batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai, serta kualifikasi guru honorer harus sesuai bidang yang diperlukan.

e. Pengembangan profesi guru

Pengembangan profesi guru digunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan, KKG/MGMP, KKKS/MKKS, menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah. Khususnya untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/blockgrant tersebut, fotocopy, biaya pendaftaran dan akomodasi seminar.

f. Membiayai kegiatan dalam kaitan dengan pengelolaan BOS

Dalam membiayai kegiatan pengelolaan dana BOS digunakan untuk membeli alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flashdisk), pengadaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT.Pos Indonesia.

g. Sarana dan Prasarana

1) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru.

Dalam rangka pembiayaan kegiatan untuk penerimaan siswa baru dana BOS digunakan untuk biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang, biaya pemasukan data pokok pendidikan, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, penyusunan RKS/RKAS berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah, dan kegiatan lain yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru.termasuk juga untuk alat tulis kantor (ATK), kosumsi panitia dan uang lembur, standar pembiayaan mangacu kepada batas kewajaran setempat atau batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2) Pengembangan Perpustakaan

a) Pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan (hanya sekolah yang tidak menerima DAK)

Dalam pengadaan buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan yang harus diperhatikan adalah kualitas buku yang baik dengan harga yang layak dan sistem pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan peraturan pemerintah khusus

bagi setiap sekolah yang menerima DAK, dana BOS tidak boleh digunakan untuk membeli buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan.

- b) Pembelian buku teks pelajaran lainnya (selain yang wajib dibeli) untuk dikoleksi di perpustakaan

Untuk pengadaan buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan yang harus diperhatikan adalah dengan memprioritaskan pemilihan buku yang sudah dibeli hak ciptanya oleh pemerintah yaitu sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 4 yaitu menyebutkan bahwa Departemen yang menangani urusan agama atau pemerintah daerah dapat membeli hak cipta buku dari pemiliknya untuk memfasilitasi penyediaan buku bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dengan harga yang terjangkau. Kalau belum tersedia baru memprioritaskan kepada buku yang telah dinilai kelayakannya. Apabila belum tersedia juga maka pemilihan buku ditetapkan oleh rapat sekolah. Pembelian buku yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah disebut dengan BSE (Buku Sekolah Elektronik) harganya lebih murah, tapi kalau sekolah membutuhkan buku yang hak ciptanya belum dibeli oleh pemerintah maka tetap dibeli tetapi melalui kesepakatan dengan guru-guru di sekolah.

c) Membiayai kegiatan pembelajaran

Kegiatan pembelajaran yang dibiayai adalah kegiatan pembelajaran kontekstual (SMP), pengembangan pendidikan karakter, pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja, usaha kesehatan sekolah (UKS), pendidikan lingkungan hidup, pembiayaan lomba-lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/pemerintah daerah. Termasuk untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan biaya transportasinya (termasuk di SMP Terbuka), biaya transportasi dan akomodasi peserta didik/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olahraga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba.

d) Membiayai kegiatan ulangan siswa

Dalam pembiayaan kegiatan ulangan siswa yang dibiayai adalah kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester/ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah. Termasuk untuk fotocopy/penggadaan soal, biaya koreksi ujian, pembuatan laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan ke orang tua, biaya mengawas ujian yang bukan bagian dari kewajiban tugas guru, biaya transport pengawas ujian diluar sekolah tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah.

e) Pembelian komputer

Pembelian desktop/work station, printer atau printer plus scanner, printer 1 unit/tahun, desktop/work station maksimum 5 unit untuk SMP dan 3 unit untuk SD. Peralatan komputer tersebut harus dicatat sebagai inventaris sekolah. Seperti yang dikatakan oleh Bendahara BOS SMP Negeri 7 Brebes, Ibu Rima Maryati, S.PD :

“untuk membuat rencana anggaran dana BOS untuk pembelian komputer dilaksanakan dengan cara melakukan pendataan perlengkapan-perengkapan komputer yang dibutuhkan oleh sekolah sedangkan untuk pembelian komputer diperbolehkan 5 unit tingkat SMP”. (wawancara Ibu Rima Maryati, S.PD Bendahara sekolah SMPN 7 Brebes tanggal 7 Nopember 2017)

Bila seluruh komponen 1 s/d 12 diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat dipergunakan untuk membeli alat peraga/media pembelajaran, komputer, peralatan UKS, pembelian meja dan kursi peserta didik jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat. Penggunaan dana untuk komponen ini harus dilakukan melalui rapat dengan dewan guru dan komite sekolah.

V.2.2. Kendala- kendala dalam pelaksanaan Efektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 7 Brebes

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Efektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 7 Brebes, ditemukan beberapa kendala Efektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) di SMP Negeri 7 Brebes, yang mana faktor-faktor tersebut terdiri dari :

1. Sosialisasi

Segala sesuatu agar dapat berjalan secara efektif atau mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, faktor sosialisasi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Karena tanpa adanya sosialisasi yang baik dan maksimal orang tidak akan mengetahui tujuan yang akan kita capai sehingga efektivitas tersebut tidak akan tercapai dengan baik. Sosialisasi yang kurang maksimal dapat dikatakan salah satu kendala efektifnya penggunaan BOS. Dengan sosialisasi akan dihasilkan pengelolaan dana BOS yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi, dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya tidak akan menghasilkan tujuan yang telah digariskan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi itu sendiri maupun bagi para pengelolanya. Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang

diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan.

3. Minimnya Dana BOS

Minimnya dana BOS yang diperoleh oleh sekolah, mengakibatkan sulitnya sekolah untuk mencapai tujuan kebijakan dana BOS itu sendiri yaitu untuk membebaskan siswa dari segala pungutan biaya apapun. Sekolah kekurangan dana untuk operasional sekolah dalam satu tahun, sehingga sekolah melalui komite masih meminta sumbangan sukarela kepada orang tua/wali siswa.

V.2.3. Solusi dalam pelaksanaan Efektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 7 Brebes

Permasalahan yang muncul dalam efektifitas dana BOS adalah pada pengelolaannya. Permasalahan muncul disinyalir sudah banyak di sekolah-sekolah. seperti juga di sekolah SMP Negeri 7 Brebes.

1. Pengawasan

Peluang untuk korupsi dalam penggunaan dana BOS di lihat dari segi kesempatan akan mungkin terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum terjadi. Untuk itu hal yang paling penting adalah meminimalisir kesempatan dan peluang tersebut supaya tidak bisa terjadi dan tidak ada kesempatan oknum untuk keluar dari aturan yang berlaku. pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa tindakan yang dilakukan aparat berwenang yang berfungsi untuk memperhatikan kondisi yang terjadi dilapangandengan kondisi yang

diharapkan dari pembuat kebijakan. Kebijakan dana BOS sudah seharusnya mendapatkan pengawasan baik dari pemerintah, karena ini merupakan program pemerintah, sehingga perhatian untuk proses pengawasan pun harus diperhatikan.

2. Pendampingan dan sosialisasi

Tidak sedikit sekolah yang melakukan kesalahan dan penyelewengan tidak dengan sengaja, ada juga faktor ketidaktahuan, atau ketidaksejahteraan sehingga oleh oknum-oknum pendidikan di perdaya dan disalahgunakan. Oleh karena itu diperlukan pendampingan dan sosialisasi sangat diperlukan. Pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan oleh para ahli yang berkompeten sehingga pihak sekolah selaku pelaksana dana BOS dapat memahami dan benar-benar mengerti terhadap pengelolaan dana BOS.

3. Peningkatan besaran dana BOS

Penyebab timbulnya masalah dalam program BOS adalah pengalokasian dana BOS tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah tetapi pada ketersediaan anggaran. Minimnya dana BOS yang diperoleh oleh sekolah, mengakibatkan sulitnya sekolah untuk mencapai tujuan kebijakan dana BOS itu sendiri yaitu untuk membebaskan siswa miskin dari segala pungutan biaya apapun dan meringankan bagi siswa lainnya. Uang yang dikeluarkan orang tua murid semakin bertambah walaupun sudah ada dana BOS. Sekolah kekurangan dana untuk operasional sekolah dalam satu tahun, sehingga

sekolah melalui komite masih meminta sumbangan sukarela kepada orang tua/wali siswa. Diperlukan adanya peningkatan/penambahan dana BOS oleh pemerintah sehingga seluruh operasional sekolah dapat tercukupi.

BAB VI

PENUTUP

VI. 1 Kesimpulan

1. Dari penelitian yang penulis lakukan tentang Efektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 7 Brebes dapat diambil kesimpulan bahwa Sekolah SMP Negeri 7 sudah menggunakan dana BOS namun penggunaan BOS di SMP Negeri 7 Brebes belum efektif, masih melakukan penarikan iuran berupa SPP setiap bulannya kepada orang tua/wali siswa melalui komite sekolah, walaupun dengan menamakan sumbangan sukarela.
2. Kendala – kendala dalam efektivitas Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 7 Brebes adalah:
 - a. Masih kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang diberikan tim manajemen BOS Kabupaten kepada tim manajemen BOS Sekolah sehingga tim manajemen BOS Sekolah kurang mengetahui penggunaan dana BOS yang baik dan batasan-batasan dalam penggunaan dana BOS tersebut.
 - b. Pengawasan oleh Dinas Pendidikan kepada sekolah yang dilakukan dalam hal penggunaan dana BOS belum maksimal, yang seharusnya diadakan diawal kegiatan dan diakhir kegiatan tetapi hanya dapat terlaksana diakhir kegiatan itupun hanya dalam bentuk pengawasan

tidak langsung atau hanya dengan memeriksa laporan penggunaan dana BOS.

- c. Minimnya dana BOS yang diperoleh oleh sekolah, mengakibatkan sulitnya sekolah untuk mencapai tujuan kebijakan dana BOS itu sendiri yaitu untuk membebaskan siswa dari segala pungutan biaya apapun. Sekolah kekurangan dana untuk operasional sekolah dalam satu tahun, sehingga sekolah melalui komite masih meminta sumbangan sukarela kepada orang tua/wali siswa.
3. Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di perlukan solusi, sehingga tujuan kebijakan dana BOS bisa tercapai yaitu dana BOS yang efektif. Diperlukan trnsparasi/keterbukaan dalam pengelolaan dana BOS dan perlunya peningkatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh tim manajemen BOS Kota/Kabupaten sehingga tim manajemen BOS sekolah benar – benar faham dan mengetahui dalam pengelolaan Dana BOS. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana BOS diperlukan pengawasan yang komprehensif dari pihak yang berwenang. Perlunya penambahan jumlah besaran dana BOS untuk mencukupi biaya operasional sekolah.

VI.2. Saran

Adapun saran-saran penulis berikan kepada para pengelola dana BOS tingkat sekolah dan tingkat Kabupaten agar tujuan penggunaan dana BOS dapat tercapai sesuai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Tim Manajemen BOS kota/Kabupaten (Dinas Pendidikan) diharapkan untuk lebih meningkatkan sosialisasi terhadap penggunaan dana BOS tersebut, agar tim manajemen BOS sekolah dapat lebih memahami penggunaan dana BOS yang sesuai ketentuan yang berlaku dan diberikannya batasan yang tegas terhadap penggunaan dana BOS oleh pemerintah kepada tim manajemen BOS sekolah, sehingga batasan terhadap penggunaan dana BOS dapat diketahui lebih jelas dan penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan dapat dihindari.
2. Pengawasan melekat yang merupakan tugas Dinas Pendidikan tingkat kota terhadap pengawasan penggunaa dana BOS pada tingkat sekolah lebih ditingkatkan agar penyelewengan penggunaan dana BOS yang tidak tepat sasaran dapat dihindari sehingga yang menjadi tujuan utama pemberian dana BOS dapat tercapai.
3. Tim Manajemen BOS sekolah SMPN 7 Brebes diharapkan lebih memahami dan lebih bertanggungjawab terhadap pengelolaan penggunaan dana BOS, sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan dana BOS yang tidak sesuai ketentuan dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A Gede. 2014. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Malang: Aditya Media Publishing.
- Amri, Sofan. 2013. *Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar & Menengah*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Maleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Matteson, Michael. 2000. *Perilaku Dan Manajemen Organisasi*. Erlangga
- Mulyasa. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah (konsep, strategi dan implementasi)*. Remaja Rosdakarya : Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kemendikbud, Peraturan Nomor 26 Tahun 2017, *Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Kemendikbud
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Kasara.
- Matin, 2014. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mendiknas, 2003. *Undang-undang R.I No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.

Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Sukardi. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan Praktiknya)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tayibnapi, Farida Yusuf. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT Rineka Cipta

....., 2017, *Profil Sekolah SMP N 7 Brebes*, Brebes